



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

● INTEGRITAS DATA TERVERIFIKASI



RLPPD2025

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

**Surabaya Forward:
Transformasi Menuju
Kota Dunia yang Humanis**



GEDUNG PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA LT. IV
JL. JIMERTO 25 - 27 KEL. GENTENG
KEC. KETABANG - KOTA SURABAYA



<https://pemerintahan.surabaya.go.id>

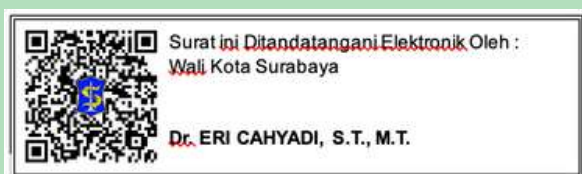
Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jls. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/168/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surabaya, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Laporan ini menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan berbagai permasalahan yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun berikutnya. Prestasi dan keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemacu Pemerintah Kota Surabaya untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahankelemahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk langkah kedepan.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, 31 Maret 2026





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan 04

Capaian Kinerja Makro
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah -
Kota Surabaya 09

Ringkasan Capaian
Kinerja Urusan
Pelayanan Dasar 14

Urusan Pendidikan 16

Urusan Kesehatan 24

Urusan Pekerjaan
Umum 32

Urusan Perumahan 39

Urusan Ketentraman
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat 45

Urusan Sosial 56

Hasil EPPD dan Opini
Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Tahun Sebelumnya 62

Ringkasan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Anggaran
Daerah 64

Inovasi Daerah 68

Penutup 98

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Dalam melaksanakan kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surabaya yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Undang-Undang Pembentukan Daerah

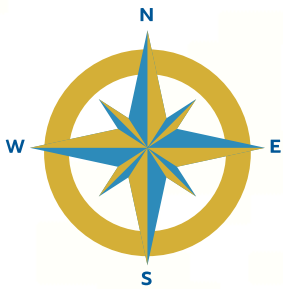
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9);
- 16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 23);
- 17. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Geografis & Topografi SURABAYA

PROFIL GEOGRAFIS



335,925 km²

Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor
100.1.1-6117 Tahun 2022

KOORDINAT ASTRONOMIS

	Lintang Selatan	07°10' s.d. 07°21'
	Bujur Timur	112°36' s.d. 112°54'

BATAS WILAYAH

Utara:
Selat Madura/
Laut Jawa

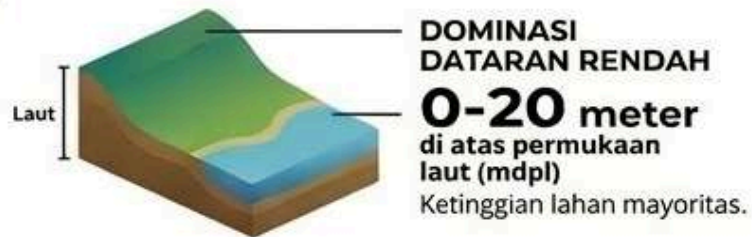
Timur:
Laut Jawa

Selatan:
Sidoarjo

Barat:
Gresik

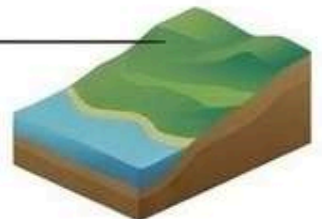


PROFIL TOPOGRAFIS



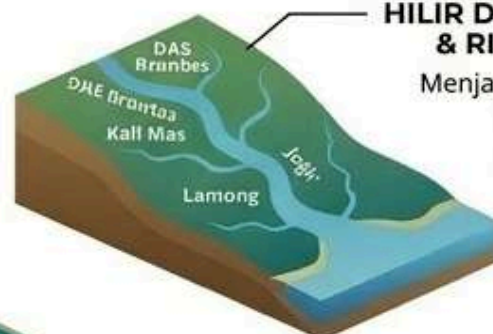
WILAYAH PERBUKITAN LANDAI

Sisi Barat dan Selatan
memiliki kemiringan 5-15%
dengan ketinggian
hingga 50 mdpl.



HILIR DAS BRANTAS & RISIKO BANJIR

Menjadi muara sungai
besar (Kali Mas,
Jagir, Lamong)
sehingga rawan
limpahan air.





Profil Demografi SURABAYA

Komposisi Penduduk Kota Surabaya

Proporsi Gender Seimbang



Perempuan
1.516.783 Jiwa

50,49%

Laki-laki
1.487.077 Jiwa

49,51%

3.003.860
Jiwa

Total jumlah penduduk
Kota Surabaya berdasarkan
Data Kementerian Bersih
(DKB) Semester II 2025.

Distribusi Populasi per Wilayah

Tambaksari sebagai Wilayah Terpadat

225.939 Jiwa

Menjadi kecamatan dengan
penduduk terbanyak yaitu
7,52% dari total penduduk.

Gayungan dengan Populasi Terkecil

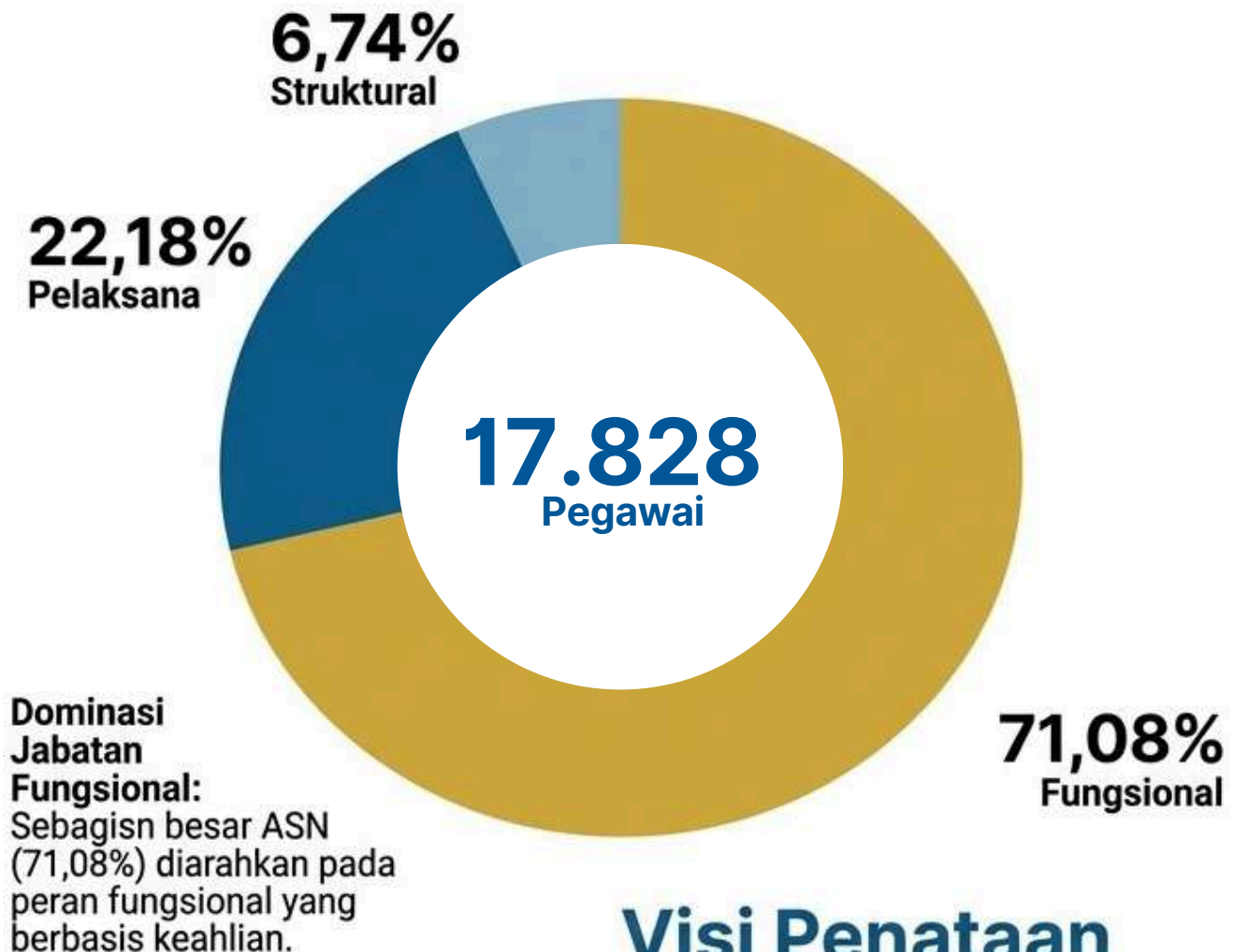
43.480 Jiwa

Memiliki jumlah penduduk
paling sedikit yakni 1,45%
dari total penduduk.



Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) SURABAYA 2025

Pemerintah Kota Surabaya mengelola **17.828 ASN** pada tahun 2025. Penataan ini didasarkan prinsip organisasi yang rasional dan proporsional sesuai beban kerja riil daerah guna menciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi.



Visi Penataan Organisasi



Prinsip Organisasi Modern:

Penataan harus bersifat rasional, proporsional, efektif, dan efisien.



Berbasis Beban Kerja:

Pembentukan perangkat daerah disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan fungsi.



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO





Capaian kinerja makro

merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2024	Tahun 2025	Laju Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia	84,69	85,65	1,13 %
Angka Kemiskinan	3,96%	3,56%	-10.10%
Angka Pengangguran	4,91%	4,84%	-1,43%
Pertumbuhan Ekonomi	5,76%	5,87%	1,91%
PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)	264.372.000	283.306.000	7,16 %
Angka Indeks Gini	0,38	0,37	-3,15 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025



Capaian Indikator Makro Kota Surabaya 2024-2025

Ringkasan indikator kinerja makro Kota Surabaya yang membandingkan data tahun 2024 (Tahun N-1) dengan 2025 (Tahun N). Data menunjukkan tren positif di seluruh sektor utama pembangunan dan ekonomi.

Indikator Pembangunan & Kesejahteraan

85,65

Indeks Pembangunan Manusia

Meningkat 1,13% dari tahun sebelumnya, mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

3,56%

Angka Kemiskinan

Mengalami penurunan sebesar 0,40% dibandingkan angka tahun 2024 yang mencapai 3,96%.

Pertumbuhan Ekonomi & Tenaga Kerja

5,87%

Pertumbuhan Ekonomi

Menunjukkan akselerasi ekonomi yang stabil dari angka 5,76% di tahun sebelumnya.

4,84%

Angka Pengangguran

Tren penurunan pengangguran sebesar 0,07% dari angka 4,91% pada tahun 2024.

Trend Line Chart

Visualisasi Tren Kinerja Makro (2024 vs 2025)





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR



Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk **di antaranya :**



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



URUSAN PENDIDIKAN

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100	90,86
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	96,43
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100,00
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	88,35
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	94,11

Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025

Indeks Pencapaian SPM: 100% (Tuntas Paripurna)

Seluruh indikator pelayanan dasar pendidikan telah mencapai target maksimal secara menyeluruh di Kota Surabaya.

Capaian Indikator Utama SPM & Dukungan Personil

Partisipasi Peserta Didik Mencapai Target Mutlak



Kekuatan Personil Pendidik & Tenaga Kependidikan



Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan

Anggaran dialokasikan secara presisi untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu setiap jenjang pendidikan.

■ Pagu Anggaran (Rupiah)
■ Realisasi Anggaran (Rupiah)



Realisasi Belanja

URUSAN PENDIDIKAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			1.183.535.632.860	976.290.688.166	82,49%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		206.451.231.876	181.086.753.336	87,71 %
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	203.794.804.737	179.855.448.686	75,47%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.090.055.139	742.559.450	33,53%
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	395.900.000	331.202.800	83,66%
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	170.472.000	157.542.400	92,42%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		127.360.872.469	102.653.124.641	80,60%
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	125.482.378.354	101.396.326.441	80,81%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.150.471.615	549.177.300	47,73%
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	515.900.000	191.743.400	100%
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	212.122.500	117.494.791.156	90,30%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		8.313.777.581	7.123.736.000	85,69%
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5.160.817.691	4.300.276.582	83,33%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.633.655.500	2.520.700.000	95,71%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	519.304.390	302.760.050	58,30%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		41.222.061.592	40.373.479.800	97,94%
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	687.061.592	228.629.800	33,28%
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendidik	40.535.000	40.144.850	99,04%
2	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			800.187.689.342	645.053.593.757	81%
	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar		10.836.016.081	10.705.956.485	98,80%
	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		205.256.350.000	204.718.678.888	99,74%
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar		78.963.400.706	15.013.774.724	19,01%
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar		14.162.461.485	13.040.387.912	92,08%
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah		11.951.216.814	11.426.695.154	99,04%
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah		11.951.216.814	11.426.695.154	95,61%
	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah		3.623.318.567	3.588.566.671	99,04%
	8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah		3.296.005.184	2.157.477.790	65,46%
	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		127.025.600.000	125.154.232.600	98,53%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1.010.611.433	806.706.504	79,82%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
2	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
	11	Pengadaan Perlengkapan PAUD		318.754.858	207.905.275	65,22%
	12	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		71.784.418.100	62.647.180.000	87,27%
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD		58.489.920.000	58.114.007.853	99,36%
	14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik/Nonformal/Kesetaraan		8.426.183.274	5.433.149.170	64,48%
	15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		101.83.000	70.200.000	68,94%
	16	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		5.195.390.000	4.997.434.444	96,19%
	17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Nonformal/Kesetaraan		803.913.317	478.226.455	59,49%
	18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		114.317.966.640	96.794.054.179	84,67%
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		67.703.075	47.600.000	70,31%
	20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar		1.769.535.332	1.329.926.872	75,16%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Permasalahan dan Solusi

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Adanya indikator yang sulit dirumuskan dan didapatkan datanya, terutama untuk indikator yang berhubungan dengan Rapor Pendidikan	- Mencari referensi pendataan lainnya baik di website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. - Merumuskan data yang diminta berdasarkan asumsi
2	Penghitungan Kebutuhan	Penghitungan kebutuhan data maupun anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM perlu konsentrasi tinggi, karena membutuhkan pemahaman yang tinggi dan fokus kepada indikator yang diminta	Berdiskusi dengan rekan kerja di dalam PD maupun lintas PD yang menangani SPM dan meminta arahan pimpinan dalam pengisian SPM
3	Perencanaan dan Penganggaran	Nama Subkegiatan dalam SPM berbeda dengan nama subkegiatan yang ada di Perangkat Daerah.	Perlu dirumuskan kesamaan nomenklatur nama subkegiatan yang ada di SPM dengan Perangkat Daerah. Dasar nomenklatur yang digunakan Perangkat Daerah adalah Peremndagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Permasalahan dan Solusi

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
4	Pelaksanaan	Anggaran di Dinas Pendidikan melekat kepada subkegiatan secara keseluruhan, sehingga apabila diminta breakdown berdasarkan anggaran yang mendukung SPM, maka perlu waktu untuk memetakannya	Adanya fasilitas tagging anggaran SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran pada aplikasi e-budgeting
5	Lain-Lain	Pemenuhan SPM di Dinas Pendidikan membutuhkan dukungan data terkait jumlah penduduk usia sekolah, agar Dinas Pendidikan mengetahui jumlah sasaran yang harus dilayani	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan jumlah penduduk usia sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

URUSAN KESEHATAN

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu	-	0,05
2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00	100,00
5	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00	100,00
6	"Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar "	100,00	100,00
7	"Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita "	-	0,59
8	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100,00	100,00

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100,00	100,00
10	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100,00	100,00
12	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	100,00
13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100,00	100,00
14	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100,00	100,00
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00

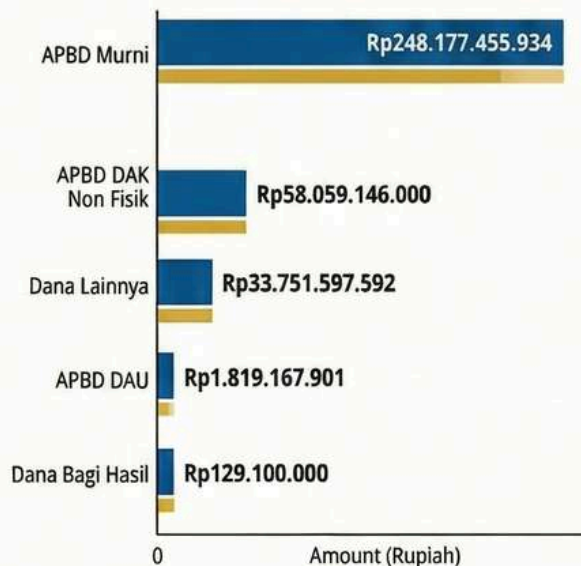
Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Kota Surabaya

Laporan ini merinci efektivitas Kota Surabaya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tahun 2025. Data mencakup keberhasilan target layanan 100%, rincian realisasi anggaran dari berbagai sumber, serta sebaran tenaga kesehatan yang mendukung layanan dasar.

Realisasi Anggaran & Capaian Indikator Utama

Realisasi Anggaran SPM Kesehatan Mencapai 81,97%

Dari total pagu Rp341.936.467.427, total serapan anggaran adalah sebesar Rp280.290.899.352.



Target Layanan Dasar Tercapai 100%

Seluruh indikator utama pelayanan kesehatan masyarakat telah mencapai target paripurna.



✓ Target
100%

Kesehatan Ibu Hamil



✓ Target
100%

Kesehatan Ibu Bersalin



✓ Target
100%

Kesehatan Bayi Baru Lahir



✓ Target
100%

Kesehatan Balita

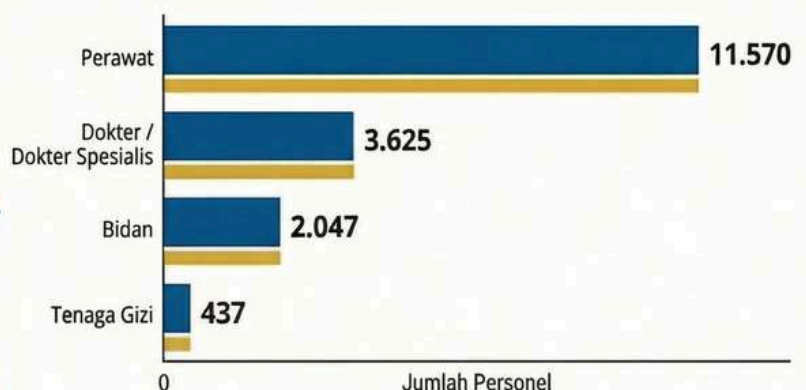
Dukungan Personel Medis

11.570 Perawat Menjadi Tulang Punggung SPM

Perawat merupakan jumlah personel terbesar dalam mendukung empat layanan kesehatan dasar utama.

Sinergi 3.625 Dokter dan 2.047 Bidan

Kolaborasi tenaga medis ahli memastikan kualitas mutu layanan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga.



Realisasi Belanja

URUSAN KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			341.936.467.427	280.290.899.352	81,97%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			10.398.467.427	8.660.500.318	83,29%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10.398.116.225	8.660.500.318	83,29%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	3.698.667.600	3.304.495.940	89,34%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000	109.620.000	99,65%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	125.000.000	111.500.000	89,20%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	1.662.403.818	1.018.364.140	61,26%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	133.260.000	88.650.000	66,52%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	1.312.197.100	1.198.105.748	91,30%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	40.000.000	40.000.000	100,00%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	133.000.000	80.854.800	60,79%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	55.000.000	48.472.000	88,13%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	756.383.230	648.060.590	85,68%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.973.781.179	1.640.427.100	83,11%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	398.423.298	372.040.000	93,38%
	JUMLAH INDIKATOR			10.398.116.225	8.660.500.318	83,29%
	JUMLAH PROGRAM			10.398.116.225	8.660.500.318	83,29%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.955.580.000	12.969.830.178	76,49%
		2	Pengelolaan Pelayanan kelanjutusiaan	227.280.000	147.480.000	64,89%
		3	Penyakit Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.110.004.895	5.695.878.786	80,11%
		4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	201.714.277.854	167.051.047.334	82,82%
		5	Operasional Pelayanan Puskesmas	45.927.334.279	27.931.056.257	95,57%
		6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	23.994.708.621	22.931.056.257	95,57%
		7	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	38.400.060	35.370.000	92,11%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	841.879.501	748.781.136	88,94%
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	977.288.400	697.008.960	71,32%
		10	Bantuan Persediaan (Bantuan Pusat, Provinsi, CSR dan Hibah DII)	33.751.597.592	33.751.597.592	100,00 %

Sumber : Dinas Kesehatan 2025



Permasalahan dan Solusi

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	- Ketepatan dan kelengkapan pengumpulan data oleh puskesmas. - Data puskesmas yang terkumpul masih memerlukan proses verifikasi dan validasi	- Memperkuat koordinasi dan penanggungjawab laporan masing-masing Puskesmas - Melakukan validasi data setiap bulan
2	Penghitungan Kebutuhan	- Kebutuhan sarana pendukung SPM dilaksanakan lintas bidang - Terdapat satu komponen pendukung yang digunakan oleh beberapa lintas program atau indikator SPM	- Memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas bidang - memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas bidang serta menyiapkan sistem pencatatan barang yang bisa menelusur langsung ke program
3	Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat indikator kinerja SPM yang secara penganggaran diampu oleh beberapa subkegiatan	Perencanaan penganggaran dimasukkan ke subkegiatan lain
4	Pelaksanaan	HIV : Sebaran populasi kunci yang tidak merata dan terkadang tersembunyi	Melakukan mobile testing ke spot spot beresiko dan bekerjasama secara intensif dengan LSM untuk mengedukasi dan mendorong populasi kunci untuk pelayanan HIV

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



URUSAN PEKERJAAN UMUM

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	0	100,00
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	99,20	99,23
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	100,00	100,00
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	100,00
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0	28,67
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	-	39,98
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00	100,00
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	-	100,00

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
9	"Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi "	44,07	45,51
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	-	100,00

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Kota Surabaya

Capaian Kinerja Pelayanan Dasar (SPM)

100%

Partisipasi Layanan Air Minum

Seluruh 3.018.022 warga yang ditargetkan telah memperoleh akses kebutuhan pokok air minum.

100%

Akses Pengolahan Air Limbah Domestik

Sebanyak 577.832 rumah tangga telah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah.

Tuntas Paripurna Mutu Layanan

Capaian mutu layanan dasar (Barang/Jasa/SDM) memenuhi standar teknis **100% tanpa selisih**.

Perbandingan Target vs Realisasi Indikator SPM



Realisasi Anggaran & Dukungan Personel Teknis

389

Personel Organik Produksi

Dukungan inti pada subdirektorat produksi, distribusi, dan pemeliharaan instalasi air.

426

Personel Anorganik Distribusi

Tenaga lapangan yang memastikan kelancaran layanan di wilayah timur dan barat.

Dukungan Perencanaan & Pengendalian

Tim khusus untuk pengendalian proses dan perencanaan teknis infrastruktur kota.

Indikator Anggaran Urusan Pekerjaan Umum (dalam Rupiah)

Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	1.791.912.422.132
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker	379.054.040.884
Total Anggaran APBD Urusan PU	6.366.886.760
Anggaran APBD Murni	6.366.886.760
Pendanaan Dana Lainnya	372.687.154.124

Realisasi Belanja

URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			379.054.040.884	329.597.335.359	86,95%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.366.886.760	5.893.037.787	92,56%
		1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5.701.373.831	5.244.403.352	91,98%
		2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	665.512.929	648.634.435	97,46%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota		372.687.154.124	323.704.297.572	86,86%

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025



Permasalahan dan Solusi

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	• Belum memiliki anggaran untuk survey jumlah rumah • Tidak semua pelanggan mau memberikan data kependudukan	• Dilakukan penyusunan rencana penganggaran untuk kebutuhan survey • Permohonan ke instansi terkait kependudukan untuk mencocokkan data alamat dengan data jiwa yang tinggal
2	Penghitungan Kebutuhan	• Diperlukan klasifikasi keterjangkauan armada pengangkutan berdasarkan volume dan akses menuju lokasi penyedotan (terutama pada kawasan padat penduduk) • Pengumpulan data akses air limbah belum maksimal sehingga mengakibatkan kesulitan dalam perhitungan kebutuhan	• Diperlukan koordinasi dan penyusunan rencana pelayanan serta survey penerima layanan sanitasi
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Cakupan wilayah yang besar diperlukan pembagian wilayah layanan • Belum dilakukan update RISPAL	• Diperlukan perencanaan sistem pengolahan air limbah domestik
4	Pelaksanaan	• Beberapa infrastruktur terbangun belum sesuai dengan kriteria atau standart yang ditetapkan • Kurangnya sosialisasi dan pendampingan sehingga infrastruktur yang sudah terbangun tidak termanfaatkan dengan efektif	• Diperlukan sosialisasi ke masyarakat dan penerima manfaat layanan sanitasi yang berkelanjutan

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0	100,00
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0	100,00
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	-	100,00
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Kota Surabaya

Laporan ini merinci performa Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat. Fokus utama mencakup penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah, didukung oleh transparansi anggaran yang mencapai serapan tinggi dan dukungan personil yang solid.



Capaian Indikator Utama SPM

Indeks Pencapaian SPM: Tuntas Paripurna (100.00%)

Seluruh target pelayanan dasar perumahan tahun 2025 telah terpenuhi secara maksimal.

Indikator Utama SPM

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar **100.00%**



Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar **100.00%**



Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana **100.00%**



Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi **100.00%**



Realisasi Anggaran & Dukungan Personil

Efisiensi Serapan Anggaran Mencapai 97.19%

Realisasi anggaran menunjukkan manajemen keuangan daerah yang sehat dan transparan.

Indikator Realisasi Anggaran

APBD Kota Surabaya

12.310.975.247.579

Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah

1.726.438.057.449

Alokasi Anggaran Penerapan SPM

153.200.289.711

Realisasi Anggaran (Serapan)

148.890.839.218

Persentase Serapan

97,19%

Indikator Dukungan Personil Utama

Tenaga Kebersihan

98

Tenaga Keamanan

58

Tenaga Administrasi

21

Aparatur Sipil Negara (ASN)

7

Realisasi Belanja

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			153.200.289.711	148.890.839.218	97,19%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			153.200.289.711	148.890.839.218	97,19%
	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten /kota				
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	153.200.289.711	148.890.839.218	97,19%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025



Permasalahan dan Solusi

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan data	Warga / Pemilik Bidang tidak mau menyerahkan data untuk kelengkapan berkas pengadaan tanah.	Melakukan sosialisasi dengan melibatkan RT,RW dan Kelurahan setempat
2	Pengumpulan data	Data masyarakat yang dinamis sehingga menimbulkan ketidaksesuai-an data terhadap realitas dilapangan.	Pengoptimalan penggunaan aplikasi / pendataan secara elektronik dan terkoneksi dengan data kependudukan lainnya.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Kebutuhan Anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran (Keterbatasan Anggaran)	Mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang priotitas, meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran, menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pihak lain, serta melakukan evaluasi dan revisi anggaran
4	Pelaksanaan	Tidak adanya target intervensi karena keterbatasan unit hunian di Rusunawa, sehingga tidak memungkinkan dilakukan fasilitasi secara langsung di Rusun. Saat ini UPTD Rusun DPRKPP fokus pada percepatan proses antrian penghuni yang masih mencapai sekitar 10.519 pendaftar.	Fokus pada percepatan penempatan penghuni melalui klasifikasi prioritas sesuai arahan Wali Kota Surabaya, yaitu: keluarga miskin sebagai prioritas utama, disusul keluarga pra miskin, dan terakhir yang tidak masuk dalam kedua kategori tersebut. Penyesuaian program dilakukan seiring ketersediaan unit hunian yang ada.
5	Pelaksanaan	Adanya Sengketa kepemilikan antar Ahli Waris / Warga menolak terhadap nilai ganti rugi yang disampaikan	Dapat dilakukan Konsiyasi (Penitipan Uang Ganti Rugi) di Pengadilan Negeri Surabaya

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



*URUSAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT*

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-	66,67
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	-	100,00
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00	100,00
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	100,00
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	1,42
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00

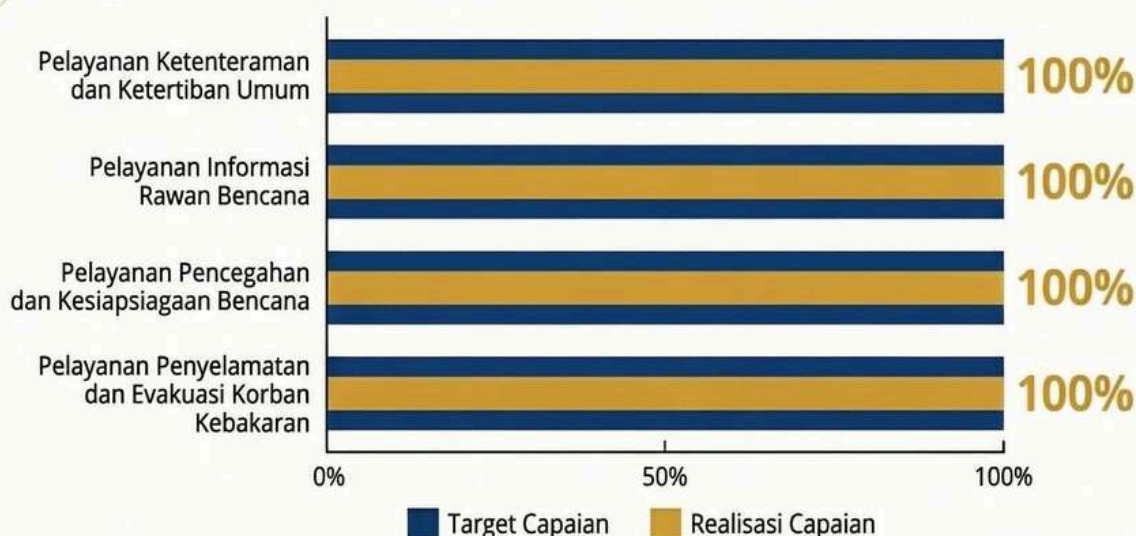
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya

Laporan ini menyajikan data pencapaian 100% pada seluruh indikator utama SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dokumen ini merinci kekuatan personel operasional dan realisasi anggaran yang digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan serta kesiapsiagaan bencana di Kota Surabaya.

Capaian 100% pada Seluruh Layanan Dasar

Seluruh target indikator utama mulai dari ketertiban umum hingga evakuasi bencana berhasil terpenuhi.



Efisiensi Anggaran Mencapai 94.52%

Penyerapan anggaran menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dalam mendukung operasional lapangan.

Indikator Realisasi Anggaran	Nilai Rupiah (Pagu/Realisasi)
Total Pagu Anggaran SPM	Rp172.423.605.144
Total Realisasi Anggaran SPM	Rp162.978.490.519
Realisasi Program Trantibum	Rp57.119.079.754
Realisasi Program Penanggulangan Bencana	Rp23.733.367.585
Realisasi Program Kebakaran & Penyelamatan	Rp82.126.003.180

Kekuatan 2.230 Personel Inti

Didominasi oleh tenaga operasional lapangan untuk menjamin respon cepat di seluruh wilayah kota.

Jenis Dukungan Personel	Jumlah
Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.480
Pemadam Kebakaran	750

Realisasi Belanja

URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			172.423.605.144	162.978.450.519	94,52%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			62.799.665.922	57.119.079.754	90,95%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		56.109.028.723	53.036.241.062	94,56%
		1	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.466.154.620	1.125.077.758	76,74%
		2	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1.250.273.778	759.545.933	60,75%
		3	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	157.182.324	122.888.000	78,18%
		4	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	265.412.857	226.640.500	85,39%
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.424.961.844	48.354.340.371	95,89%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.545.043.300	2.467.748.500	96,96%
	JUMLAH INDIKATOR			56.109.028.723	53.056.241.062	94,56%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		6.490.982.062	3.915.079.492	60,32%
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.193.489.517	613.796.850	51,43%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	924.019.397	753.483.960	81,54%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	4.373.473.148	2.547.798.692	58,26%
	JUMLAH INDIKATOR			6.490.982.062	3.915.079.492	60,32%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		199.655.137	147.759.200	74,01%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	199.655.137	147.759.200	74,01%
	JUMLAH INDIKATOR			199.655.137	147.759.200	74,01%
	JUMLAH PROGRAM			62.799.665.922	57.119.079.754	90,95%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			25.129.339.843	23.733.367.585	94,44%
	4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.789.556.893	1.545.882.900	86,38%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	1.260.233.947	1.085.738.288	86,15%
		2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	265.890.000	218.396.160	82,14%
		3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	263.432.946	241.748.452	91,77%
	JUMLAH INDIKATOR			1.789.556.893	1.545.882.90	86,38%
	5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		23.339.782.950	22.187.484.685	95,06%
		1	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	23.339.782.950	22.187.484.685	95,06%
	JUMLAH INDIKATOR			23.339.782.950	22.187.484.685	95,06%
	JUMLAH PROGRAM			25.129.339.843	23.733.367.585	94,44%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			84.494.599.379	82.126.003.180	97,20%
	6	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		83.565.422.009	81.381.297.306	97,39%
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	16.089.829.919	14.997.892.271	93,21%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7.936.255.666	7.442.862.273	93,78%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		3	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	668.511.330	570.582.308	85,35%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	58.870.825.094	58.369.960.454	99,15%
	JUMLAH INDIKATOR			83.565.422.009	81.381.297.306	97,39%
	7	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		444.788.934	338.408.774	76,08%
		1	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	444.788.934	338.408.774	76,08%
	JUMLAH INDIKATOR			444.788.934	338.408.774	76,08%
	8	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	484.388.436	406.297.100	83,88%
	JUMLAH INDIKATOR			484.388.436	406.297.100	83,88%
	JUMLAH PROGRAM			84.494.599.379	82.126.003.180	97,20%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025



Permasalahan dan Solusi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Kompleksitas permasalahan sosial dan dinamika perkotaan	Mengembangkan sistem pendataan dan pemetaan gangguan trantibum secara berkala berbasis wilayah, meningkatkan koordinasi dengan kecamatan/kelurahan serta perangkat daerah terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan serta pengolahan data
2	Penghitungan Kebutuhan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kompetensi	Melakukan analisis kebutuhan SDM sesuai standar pelayanan minimal, mengusulkan penambahan personel secara bertahap, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis
3	Pelaksanaan	Belum optimalnya dukungan anggaran dan sarana prasarana mengakibatkan pelaksanaan pelayanan dasar Trantibum tidak berjalan maksimal	Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran melalui dokumen perencanaan daerah serta mengusulkan pemenuhan sarana prasarana operasional secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan
4	Pelaksanaan	Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait masih belum efektif	Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan melalui forum koordinasi, rapat rutin, dan pelaksanaan operasi terpadu
5	Pelaksanaan	Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan ketertiban umum	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan daerah serta pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendekatan persuasif

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Permasalahan dan Solusi

Kebencanaan

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Kejadian dan korban bencana tidak dapat dihitung secara proyeksi	Menggunakan data historis kejadian bencana untuk memprediksi kemungkinan kejadian bencana di masa depan
2	Penghitungan Kebutuhan	Penganggaran terkait kebencanaan sulit dilakukan secara akurat	Mengintegrasikan anggaran kebencanaan dengan anggaran pembangunan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana
3	Perencanaan dan Penganggaran	Perlu menggerakkan penta helix dalam penanggulangan bencana secara menyeluruh	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pentahelix guna meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
4	Pelaksanaan	Membentuk budaya sadar bencana diawali dari masing-masing pribadi, sehingga sosialisasi yang menghadirkan perwakilan warga menjadi kurang efektif	Melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RW agar dapat menjangkau tiap warga masyarakat secara langsung
5	Pelaksanaan	Data warga negara di kawasan rawan bencana by name by address memerlukan waktu untuk divalidasi	Meningkatkan koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan di wilayah rawan bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Permasalahan dan Solusi

Pemadam Kebakaran

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Perlunya data pemetaan wilayah terkait mitigasi potensi bencana kebakaran di lingkungan padat penduduk	Melakukan pembaharuan analisa atas data pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulai di masyarakat (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan) yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya untuk memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
2	Penghitungan Kebutuhan	Perlunya perencanaan untuk pembaharuan APD personil	Melakukan analisa dan pendataan APD secara berkala agar dapat memonitoring kondisi APD yang layak maupun yang sudah tidak layak pakai
3	Penghitungan Kebutuhan	Perlunya perencanaan kebutuhan sarana prasarana	Melakukan analisa kembali terkait kebutuhan jumlah sarana dan prasarana
4	Pelaksanaan	Kejadian dan korban dalam kebakaran tidak dapat diprediksi	Melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu dan team
5	Pelaksanaan	Kondisi saat menuju lokasi kejadian sering terkendala oleh kemacetan lalu lintas	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

URUSAN SOSIAL

Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	100,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	100,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	100,00
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	100,00
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00	100,00
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100,00	100,00

Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kota Surabaya

Laporan ini merinci efektivitas urusan sosial Kota Surabaya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai regulasi. Data mencakup keberhasilan target 100% pada layanan rehabilitasi, rincian serapan anggaran dalam nilai Rupiah penuh, serta distribusi personel pada unit pelaksana teknis utama.

REALISASI ANGGARAN URUSAN SOSIAL



TARGET DAN PENCAPAIAN SPM 2025



Rehabilitasi Sosial Disabilitas & Anak Telantar

Seluruh warga negara yang terdata dalam kategori ini telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.

100%



Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Telantar

Target pemenuhan layanan bagi lansia telantar di luar panti tercapai sepenuhnya sesuai standar.

100%



Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng)

Penanganan gelandangan dan pengemis telah memenuhi target pelayanan dasar secara paripurna.

100%



Perlindungan Korban Bencana

Jaminan sosial bagi korban bencana daerah telah terpenuhi 100% sesuai kebutuhan lapangan.

100%

DUKUNGAN PERSONEL OPERASIONAL SPM



103 Personel di UPTD Liponsos Keputih

Personel pendukung utama untuk layanan rehabilitasi dasar tuna sosial (gelandangan dan pengemis).



78 Personel di UPTD Griya Wreda

Tim pendukung khusus untuk layanan rehabilitasi sosial lanjut usia telantar.



69 Personel di UPTD Babat Jerawat

Staf operasional yang menangani rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas telantar.



23 Personel di UPTD Kampung Anak Negeri

Personel inti yang mengelola rehabilitasi sosial dasar untuk anak telantar.

Realisasi Belanja

URUSAN SOSIAL

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	KOTA SURABAYA			41.651.824.605	34.998.112.404	84,03%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		39.465.793.257	32.868.146.376	83,28%
		1	Penyediaan permakanan	14.438.267.558	10.795.875.565	74,77%
		2	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	15.011.739.991	12.987.782.183	86,52%
		3	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	9.261.986.295	8.370.980.051	90,38%
		4	Pemberian layanan rujukan	753.799.413	713.508.577	94,65%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.452.184.748	1.396.119.428	96,14%
		1	Penyediaan makanan	1.398.526.460	1.342.461.140	95,99%
		2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	53.658.288	53.658.288	100%
KEGIATAN LAINNYA						
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			733.846.600	733.846.000	100%
		1	Hibah BPBD Provinsi Jawa Timur bantuan sandang untuk korban bencana	733.846.600	733.846.600	100%

Sumber : Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Permasalahan dan Solusi

Dinas Sosial

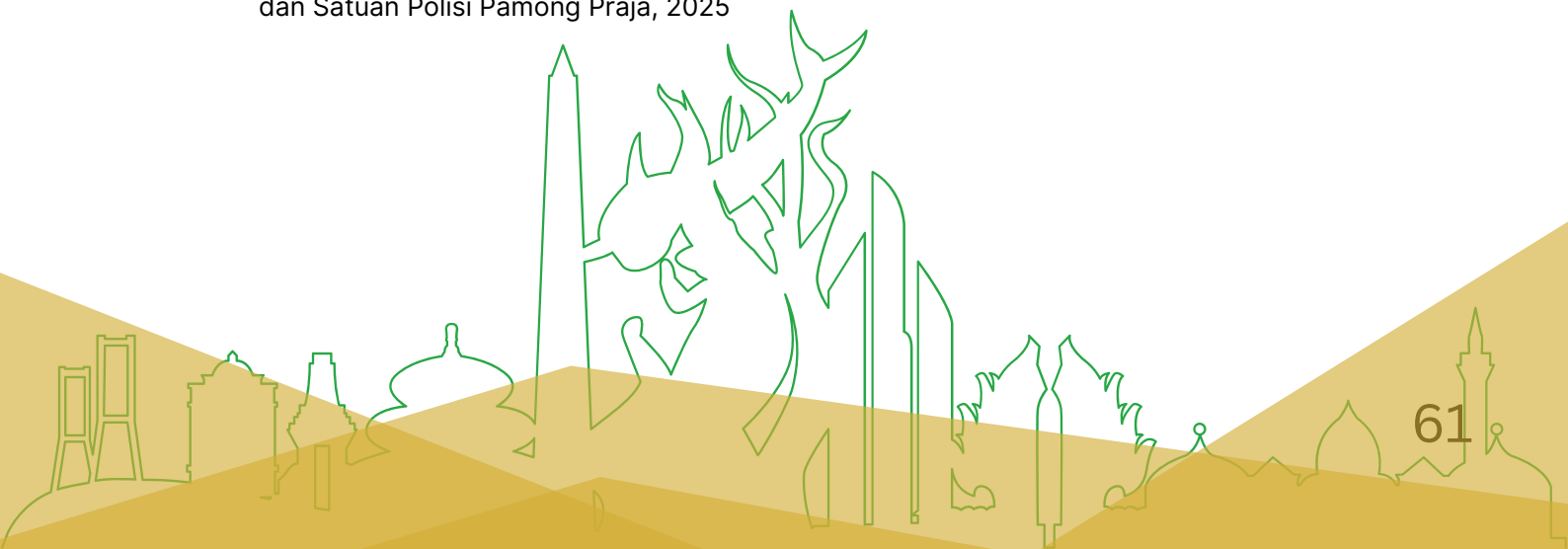
No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	(Dinsos) Adanya keterlambatan pemenuhan data yang diminta	Meningkatkan koordinasi dan penegasan batas waktu penyampaian data kepada unit terkait serta melakukan monitoring berkala terhadap pemenuhan kebutuhan data
2	Pengumpulan Data	(Dinsos) Adanya ketidaklengkapan data yang diminta	Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala serta meningkatkan kapasitas petugas dalam pengelolaan dan penginputan data
3	Perencanaan dan Penganggaran	(Dinsos) Penggunaan anggaran disesuaikan kebutuhan	Melakukan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan prioritas pelayanan serta melakukan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala agar lebih efektif dan tepat sasaran
4	Pelaksanaan	(Dinsos) Pemenuhan kebutuhan dilaksanakan lintas UPTD	Memperkuat koordinasi dan pembagian tugas antar UPTD melalui mekanisme komunikasi dan pelaporan yang jelas agar pemenuhan layanan dapat berjalan lebih optimal

Permasalahan dan Solusi

Dinas Sosial

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
5	Pengumpulan Data	(BPBD) Apabila terjadi bencana skala besar, urgensi penyaluran bantuan permakanaan menjadi prioritas sehingga data by name tidak tersedia	Melakukan pendataan korban secara bertahap setelah kondisi darurat terkendali serta mengoptimalkan pendataan sementara berbasis estimasi lapangan
6	Pengumpulan Data	(BPBD) Data bencana sangat terbatas dan tidak dapat diproyeksikan	Mengembangkan sistem pengumpulan dan pengelolaan data kebencanaan secara terpadu serta memperkuat basis data historis kejadian bencana
7	Penghitungan Kebutuhan	(BPBD) Kebutuhan untuk korban bencana tidak dapat diestimasi secara pasti	Menyediakan buffer stock logistik kebencanaan serta melakukan perencanaan kebutuhan bantuan berdasarkan skenario potensi bencana
8	Pelaksanaan	(BPBD) Koordinasi lintas PD menjadi dinamika tersendiri	Meningkatkan mekanisme koordinasi melalui forum lintas perangkat daerah dan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanganan bencana
9	Pelaksanaan	(BPBD) Kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan korban	Meningkatkan kesiapsiagaan logistik dan memperkuat sistem distribusi bantuan melalui koordinasi dengan pihak terkait serta pemetaan jalur distribusi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

BAB III

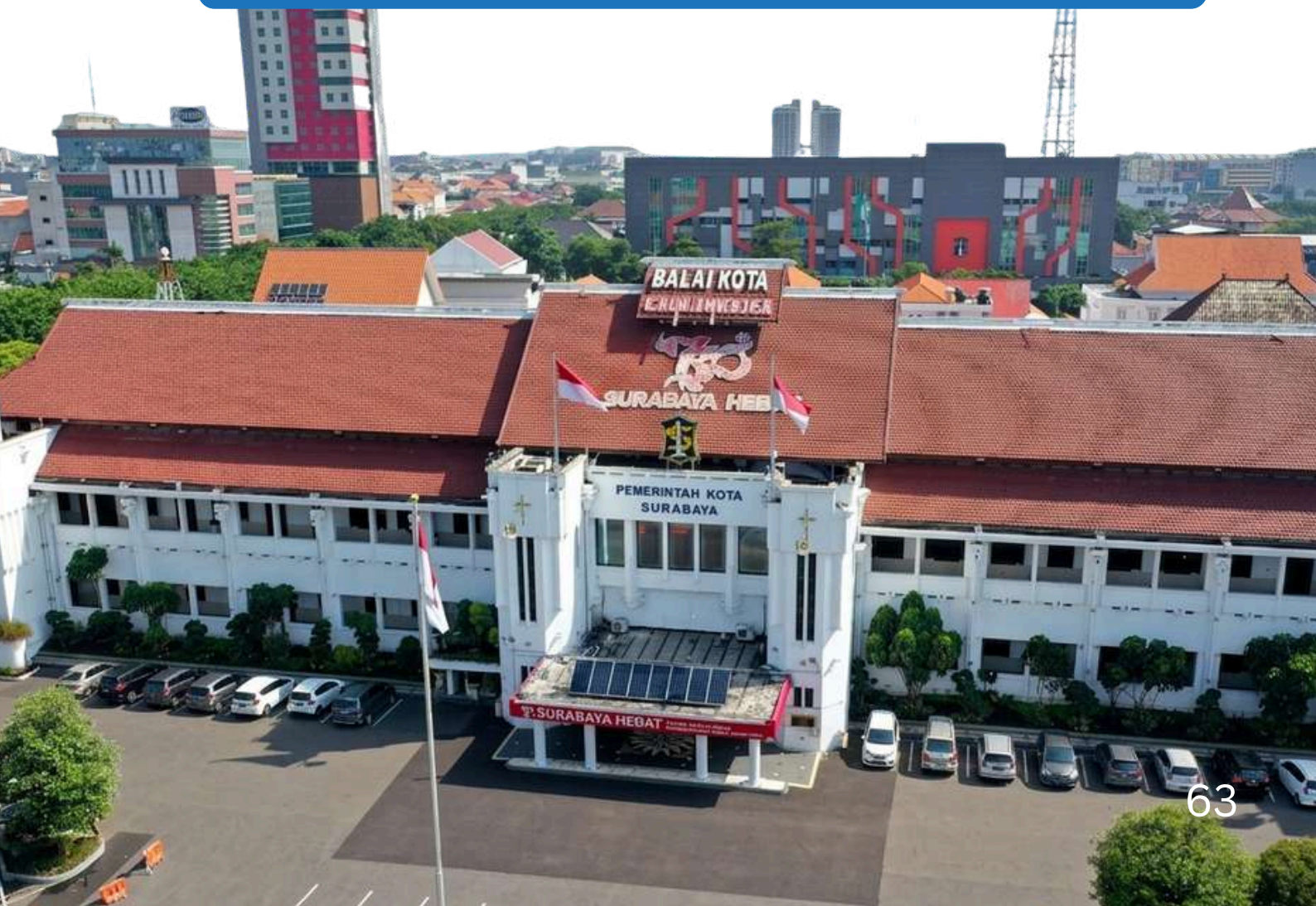
*HASIL EPPD DAN OPINI
ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN
SEBELUMNYA*

1

Hasil EPPD Tahun Sebelumnya Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 - 2019 Tahun 2025 Kota Surabaya mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1120 dan status kinerja Sedang.

2

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor 106/S-HP/XVIII.SBY/04/2025 Kota Surabaya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024





PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

BAB IV

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

PENDAPATAN

UNAUDIT

Pendapatan Asli Daerah 91,19

● Anggaran ● Realisasi



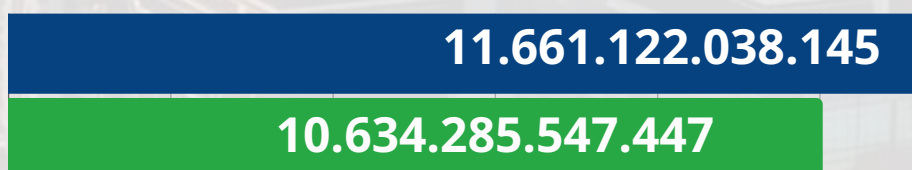
Pendapatan Transfer 98,71

● Anggaran ● Realisasi



Jumlah Pendapatan Daerah 91,19

● Anggaran ● Realisasi



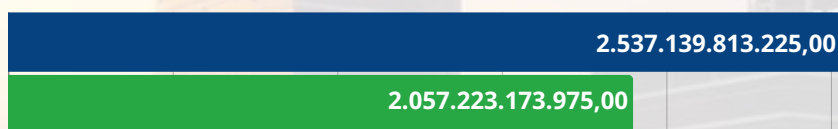
Belanja Operasi 86,94

● Anggaran ● Realisasi



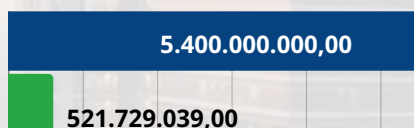
Belanja Modal 81,08

● Anggaran ● Realisasi



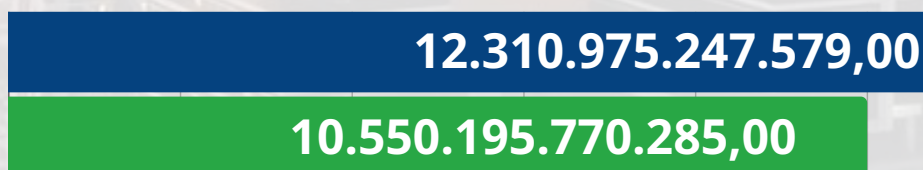
Belanja Tidak Terduga 9,66

● Anggaran ● Realisasi



Jumlah Belanja 85,70

● Anggaran ● Realisasi



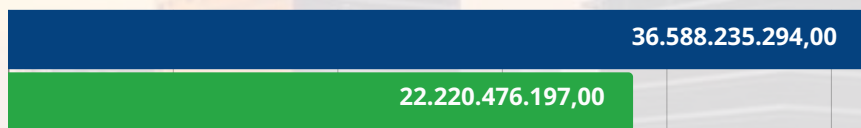
Penerimaan Daerah 66,29

● Anggaran ● Realisasi



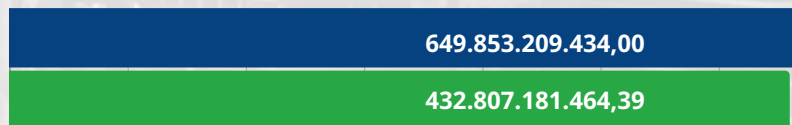
Pengeluaran Daerah 60,73

● Anggaran ● Realisasi



Pembiayaan Netto 66,60

● Anggaran ● Realisasi



SILPA 2025

516.896.958.627,29

SILPA 2024

234.306.192.444,30



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

BAB V *INOVASI DAERAH*



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 348 Faksimile (031) 5474482
Laman surabaya.go.id, Pos-el: brida@surabaya.go.id

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN INOVASI DAN
TELAH MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM KEGIATAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Produk Inovasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian Program dan atau Kegiatan	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	Capaian (%)	Ket
1	Sekretariat DPRD	3	3	100%	
2	Inspektorat	5	5	100%	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	11	100%	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	100%	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	100%	
6	Badan Pendapatan Daerah	5	5	100%	
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	5	100%	
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	100%	
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5	5	100%	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	9	100%	
11	Dinas Kesehatan	8	8	100%	
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	5	100%	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100%	
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	5	5	100%	
15	Dinas Lingkungan Hidup	5	5	100%	
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	6	100%	
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	100%	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	100%	
19	Dinas Pendidikan	5	5	100%	
20	Dinas Perhubungan	5	5	100%	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Produk Inovasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian Program dan atau Kegiatan	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	Capaian (%)	Ket
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5	5	100%	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	100%	
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	8	100%	
24	Dinas Sosial	5	5	100%	
25	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	6	6	100%	
26	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	5	5	100%	
27	RSUD Bhakti Dharma Husada	5	5	100%	
28	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	5	5	100%	
29	RSUD Eka Candrarini	5	5	100%	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	6	6	100%	
31	Bagian Hukum dan Kerjasama	5	5	100%	
32	Bagian Organisasi	8	8	100%	
33	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	100%	
34	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	3	3	100%	
35	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	3	100%	
36	Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	100%	
37	Kecamatan Asemrowo	4	4	100%	
38	Kecamatan Benowo	3	3	100%	
39	Kecamatan Bubutan	3	3	100%	
40	Kecamatan Bulak	3	3	100%	
41	Kecamatan Dukuh Pakis	3	3	100%	
42	Kecamatan Gayungan	6	6	100%	
43	Kecamatan Genteng	18	18	100%	
44	Kecamatan Gubeng	5	5	100%	
45	Kecamatan Gunung Anyar	3	3	100%	
46	Kecamatan Jambangan	4	4	100%	
47	Kecamatan Karang Pilang	3	3	100%	
48	Kecamatan Kenjeran	6	6	100%	
49	Kecamatan Krembangan	7	7	100%	
50	Kecamatan Lakarsantri	3	3	100%	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Produk Inovasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian Program dan atau Kegiatan	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	Capaian (%)	Ket
51	Kecamatan Mulyorejo	3	3	100%	
52	Kecamatan Pabean Cantian	3	3	100%	
53	Kecamatan Pakal	4	4	100%	
54	Kecamatan Rungkut	6	6	100%	
55	Kecamatan Sambikerep	3	3	100%	
56	Kecamatan Sawahan	3	3	100%	
57	Kecamatan Semampir	3	3	100%	
58	Kecamatan Simokerto	5	5	100%	
59	Kecamatan Sukolilo	3	3	100%	
60	Kecamatan Sukomanunggal	3	3	100%	
61	Kecamatan Tambaksari	3	3	100%	
62	Kecamatan Tandes	4	4	100%	
63	Kecamatan Tegalsari	3	3	100%	
64	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	4	4	100%	
65	Kecamatan Wiyung	4	4	100%	
66	Kecamatan Wonocolo	6	6	100%	
67	Kecamatan Wonokromo	3	3	100%	
Jumlah		340	340	100%	

Surabaya, 27 Febuari 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surabaya



Dr. AGUS HAM SONHAJI ST, M.MT

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 197010231996021001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 348 Faksimile (031) 5474482
Laman surabaya.go.id, Pos-el: brida@surabaya.go.id

RINCIAN DATA PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
1	Sekretariat DPRD	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Digitalisasi Risalah Rapat	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	Sekretariat DPRD	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Buku Tamu Online	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
3	Sekretariat DPRD	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	JDIH DPRD Kota Surabaya	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
4	Inspektorat	inovasi pelayanan publik	Digital	e-Audit	Implementasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
5	Inspektorat	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Monev MCP KPK	Implementasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	
6	Inspektorat	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Reviu Manajemen Risiko	Implementasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
7	Inspektorat	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Simaniz (Sistem Informasi Penelitian Ijazah)	Implementasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

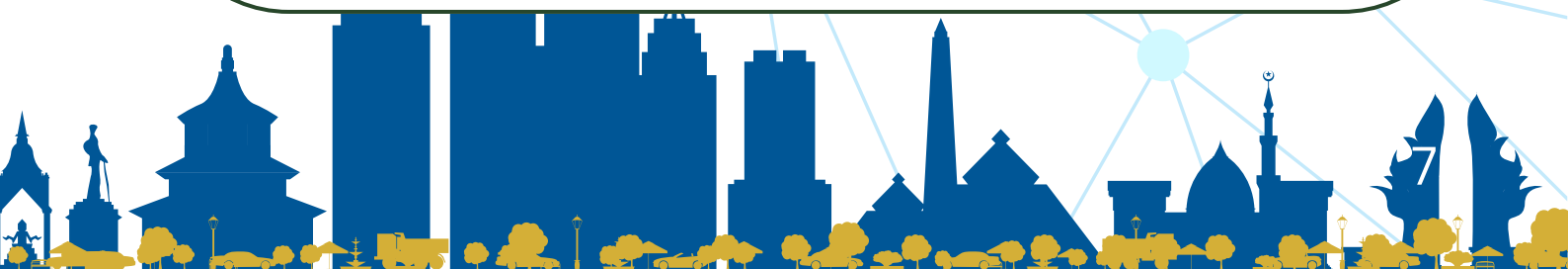
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
8	Inspektorat	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	WBS (Whistle Blowing System)	Implementasi	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	DireCK (Disiplin Reck)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-Learning	Implementasi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-SDM	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Propernas (Program Penyusunan Purna Tugas)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sigendis (Sistem Informasi Gedung Diklat Surabaya)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	Digital	Sijaka (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Arsip)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Simata Syanas (Sistem Manajemen Talenta Surabaya Naik Kelas)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sinora (Sistem Informasi Penomoran Surat)	Implementasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Teko-Cak (Absensi Karyawan Pemerintah Kota Surabaya)	Implementasi	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Tako Cak - Kantorku	Implementasi	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sibela (Sistem Informasi Tugas Belajar)	Implementasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SI ACI (Sistem Informasi Aku Cinta Indonesia)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

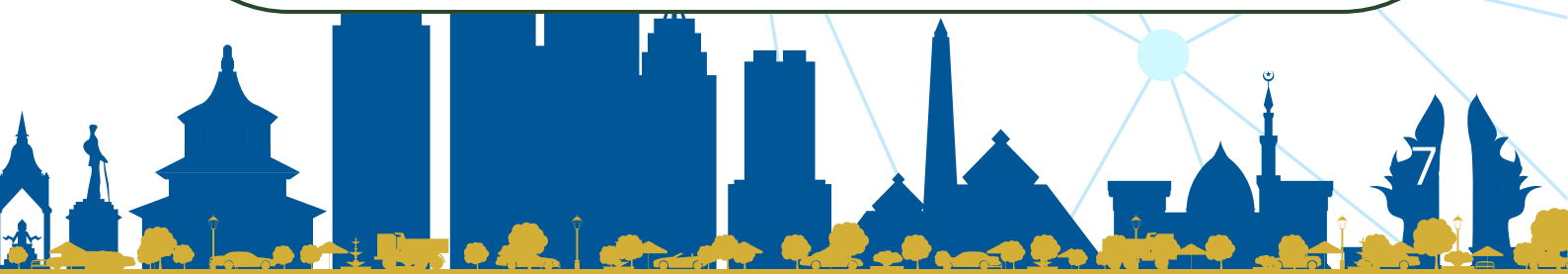
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIWASKITA (Sistem Informasi Waspada Konflik dan Tata Informasi Surabaya)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIRUBI (Sistem Informasi Rumah Bhineka)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIRUMI (Sistem Informasi Rumah Ibadah)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Tim Deteksi Dini Tingkat Kecamatan	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIPENA (Sistem Informasi Pencatatan Arsip)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	inovasi pelayanan publik	Digital	SIMBA (Sistem Informasi Barang)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	BU SARKONA (Kebutuhan Dasar Korban Bencana)	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SOSIS KETAN (Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana)	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	PAK TIKSAN (Paket Logistik Petugas Bencana)	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	TEKAD (Tim Evakuator Kedaruratan) perubahan dari TIM EMAK (Tim Emergency Evakuator)	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SINA SINI (Edukasi Bencana Usia Dini)	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Kampung Pancasila	Implementasi	Program Penanggulangan Bencana	
34	Badan Pendapatan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Tax Surveillance	Implementasi	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
35	Badan Pendapatan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-SPPT PBB	Implementasi	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
36	Badan Pendapatan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	MON PD (Monitoring Pajak Daerah)	Implementasi	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

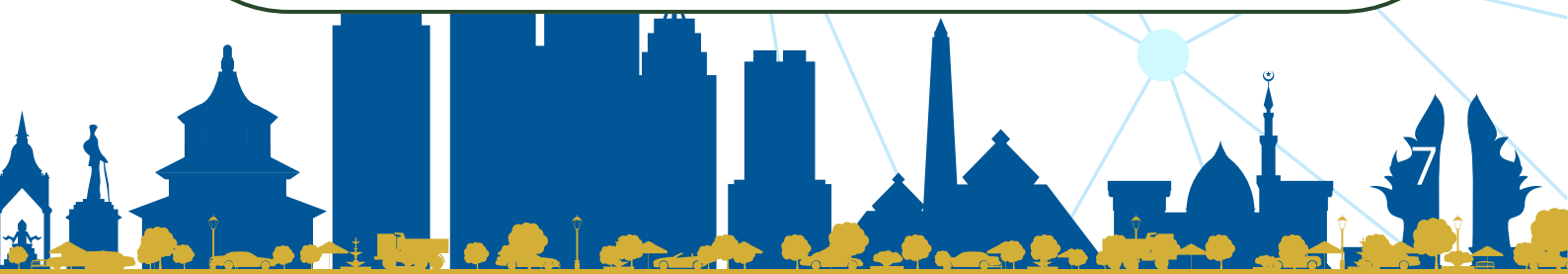
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
37	Badan Pendapatan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Surabaya Tax	Implementasi	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
38	Badan Pendapatan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	CCTV Counting	Implementasi	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIMPANAN (Sistem Informasi Manajemen Arsip IPT)	Implementasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIGASDA (Sistem Informasi Penggunaan Aset Daerah)	Implementasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)	Implementasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	E-PAYMENT	Implementasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	E-BUDGETING	Implementasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SI TALAS (Sistem Aplikasi Kota Layak Anak Surabaya)	Implementasi	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Devplan (Development Plan)	Implementasi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Opsplan (Operational Plan)	Implementasi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-monev	Implementasi	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-data	Implementasi	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
49	Badan Riset dan Inovasi Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Inovboyo (Lomba Inovasi Suroboyo)	Implementasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
50	Badan Riset dan Inovasi Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	MBOIS (Mesin Berbasis Otomatisasi Inovasi Surabaya)	Implementasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
51	Badan Riset dan Inovasi Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	E-Kajian	Implementasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
52	Badan Riset dan Inovasi Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KERANG BOYO (Kebun Raya Mangrove Surabaya di Pamurbaya)	Implementasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
53	Badan Riset dan Inovasi Daerah	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Klinik Inovasi	Implementasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Klarnid New Generation (KNG)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi pelayanan publik	non digital	LONTONG BALAP (Layanan Online Terpadu One Gate System Bersama Pengadilan Negeri dan Disdukcapil)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	LONTONG KUPANG (Layanan Online Dan Terpadu Melalui One Gate System Antara Disdukcapil Surabaya, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Surabaya)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	JEBOL ANDUK (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Goes to School dan Kampung	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	KATE-PAY	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi pelayanan publik	Digital	NASI IKAN (Layanan Integrasi Data Pendidikan dan Kependudukan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi pelayanan publik	non digital	SWARGALOKA (Suara Warga Mengeloka Kebutuhan Adminduk)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	inovasi pelayanan publik	Digital	PaHe (Paket Hemat) Akta Kelahiran+KK/ Akta Kematian+KK	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
63	Dinas Kesehatan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	PENTAS (Pendampingan Gizi Kurang dan Stunting)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
64	Dinas Kesehatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	TELE SEHAT (Konsultasi Kesehatan Online Balai RW)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah				Upaya Kesehatan Masyarakat	
65	Dinas Kesehatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	LOKUS KEREN (Layanan Khusus Kelompok Rentan)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
66	Dinas Kesehatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	BAN SEREP (Bantu Aktivasi JKN Secara Cepat)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
67	Dinas Kesehatan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	e-SIKUMBANG PEKA (Screening Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah dan Pos Paud Terpadu)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
68	Dinas Kesehatan	inovasi pelayanan publik	non digital	SI KURMA (Aksi Kunjungan Rumah)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
69	Dinas Kesehatan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan dan Rujukan by WA)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
70	Dinas Kesehatan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	PERMADANI (Persalinan Aman Dapat Foto Bayi)	Implementasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

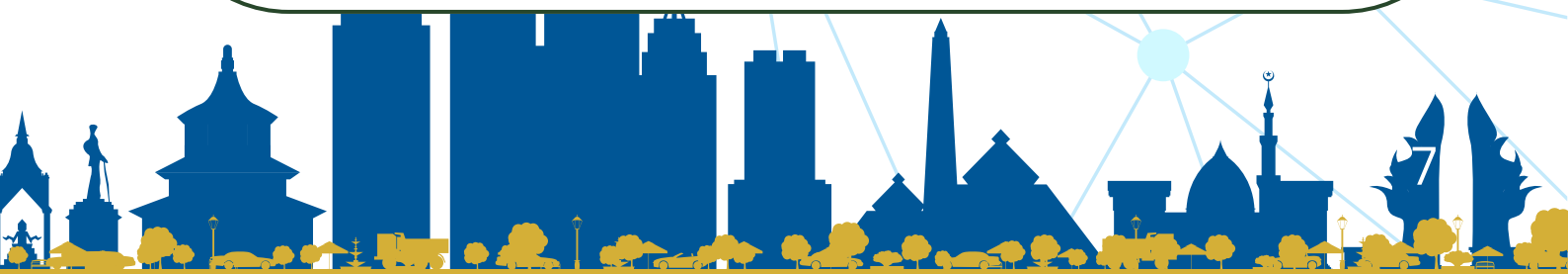
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Ladang Pangan	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
72	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KASUR BOYO (Kampung Sayur Surabaya)	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
73	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	ALARM BOYO (Adventure Land Romokalisari Surabaya)	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
74	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SOWAN PURBAYA (Sobat Hewan Puskesmas Surabaya)	Implementasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	GOLD'N MELON (GIAT ORIENTASI LAPANG UNTUK EDUKASI DI KEBUN KOLAM DAN KANDANG MINIAGROWISATA - ENCOURAGE LIVING IN HARMONY WITH NATURE)	Implementasi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
76	Dinas Komunikasi dan Informatika	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Padat Karya	Implementasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
77	Dinas Komunikasi dan Informatika	inovasi pelayanan publik	Digital	Portal Satu Data Surabaya	Implementasi	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
78	Dinas Komunikasi dan Informatika	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Awareness Keamanan Informasi	Implementasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
79	Dinas Komunikasi dan Informatika	inovasi pelayanan publik	Digital	Kantorku	Implementasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
80	Dinas Komunikasi dan Informatika	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Wargaku	Implementasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Si TERASI (Sidang Tera Ulang dan Reparasi)	Implementasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	AWASI BOYO (Aplikasi Pengawasan Koperasi di Kota Surabaya)	Implementasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
83	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	inovasi pelayanan publik	Digital	SIP UMKM (Sistem Informai & Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Implementasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIMPEL MANIS (Sistem Informasi Pelaporan Mandiri dan Terintegrasi)	Implementasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	RUMAH TERA	Implementasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
86	Dinas Lingkungan Hidup	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Simple	Implementasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
87	Dinas Lingkungan Hidup	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Implementasi	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai Peaturan Perundangan	
88	Dinas Lingkungan Hidup	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Aplikasi SIBASAM (Bank Sampah)	Implementasi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
89	Dinas Lingkungan Hidup	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Lomba KSH (Kampung Surabaya Hebat)	Implementasi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
90	Dinas Lingkungan Hidup	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	Dekorasi Tematik	Implementasi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	

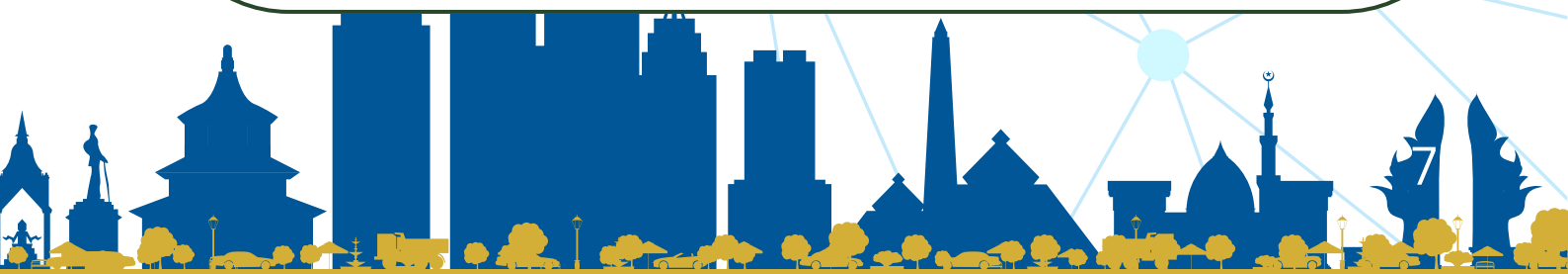
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
91	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	ROTI 6 LAPIS (Response Time 6 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	TRUK TANKER (Tim Rescue Untuk Evakuasi dan Penyelamatan Reaksi cepat di Surabaya)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
93	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SOSIS BAKAR (Sosialisasi dan Simulasi Kebakaran pada Masyarakat)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
94	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi pelayanan publik	non digital	WISDAMCIL (Wisata Damkar Cilik)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
95	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi pelayanan publik	non digital	SEDAMKAR (Senam Pemadam Kebakaran)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
96	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	inovasi pelayanan publik	non digital	PAMAN OLGA (Pemadaman Mandiri Oleh Warga)	Implementasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Kalas Calon Pengantin	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi pelayanan publik	non digital	PUSPAGA RW	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIAP PPAK! (Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	

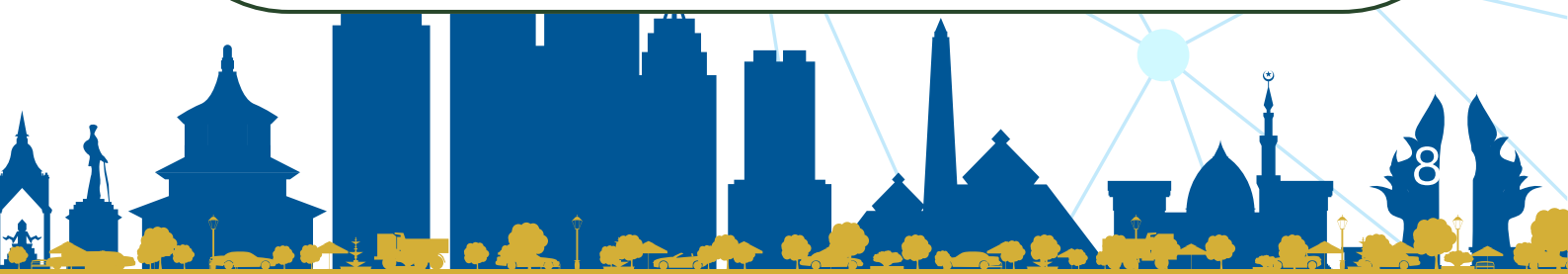
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
						Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Rumah Perubahan	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
101	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
						Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Kecamatan Responsif Gender (KRG)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
103	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Bang Boyo Hebat (Balai Orang Tua Suroboyo Hebat)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
104	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	inovasi pelayanan publik	non digital	SELANTANG (Sekolah Lansia Tangguh)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	

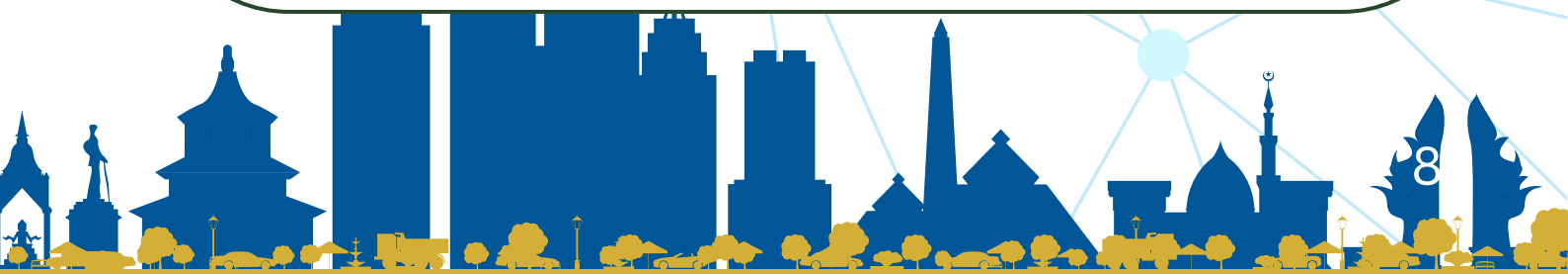
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
105	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi pelayanan publik	non digital	KEMANGI (Kelas Remaja dan Orang tua tangguh, kreatif	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
106	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIMPEL KB (Sistem Informasi Pelayanan KB)	Implementasi	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
						Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
107	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	AIS (Anugerah Investasi Surabaya)	Implementasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
108	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Aplikasi Peta Potensi	Implementasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	non digital	Klinik Investasi	Implementasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	non digital	Lapis Lupis(Layanan Asistensi dan Fasilitas Pengisian LKPM untuk Peningkatan Investasi Surabaya)	Implementasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
111	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	Digital	Mai Pelayanan Publik Virtual	Implementasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
112	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	Digital	Pesona Buaya (Pendampingan Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya)	Implementasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	Digital	Soto Panas (Sistem Online Terpadu Laporan Pengaduan Masyarakat)	Implementasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
114	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	Digital	Takon Sobat(Tanya Konsultasi Perizinan Solusi dijawab melalui Whatsapp)	Implementasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
115	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	Digital	Wani Ngurus Izin	Implementasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	inovasi pelayanan publik	non digital	Workshop Pelayanan Prima	Implementasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
117	Dinas Pendidikan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya)	Implementasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
118	Dinas Pendidikan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Rapor Online	Implementasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
119	Dinas Pendidikan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	Sekolahe Arek Suroboyo	Implementasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
120	Dinas Pendidikan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	Implementasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
121	Dinas Pendidikan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Tryout Online	Implementasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
122	Dinas Perhubungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Taman Lalu Lintas Joyoboyo	Implementasi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe C di Kota Surabaya	
123	Dinas Perhubungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Tunnel Joyoboyo	Implementasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
124	Dinas Perhubungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Parkir Vallet Tunjungan	Implementasi	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
125	Dinas Perhubungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Suroboyo Bus Listrik	Implementasi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
126	Dinas Perhubungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Halte Untuk Reklame	Implementasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
127	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Si IMTA (Sistem Informasi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)	Implementasi	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
128	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	APIK (Aplikasi Perusahaan Industri dan Ketenagakerjaan)	Implementasi	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
129	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASSik (Arek Suroboyo Siap Kerja)	Implementasi	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
130	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-PPIH (Pencatatan Perselisihan Hubungan Industri)	Implementasi	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
131	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Industri	Implementasi	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
132	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Arsip	Implementasi	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inovasi pelayanan publik	Digital	GENDIS SEWU (Gerakan Mendongeng dan Menulis Seribu)	Implementasi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
134	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inovasi pelayanan publik	Digital	Rumah Bahasa	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	inovasi pelayanan publik	Digital	Wisata Buku	Implementasi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	DANDAN OMAH	Implementasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	

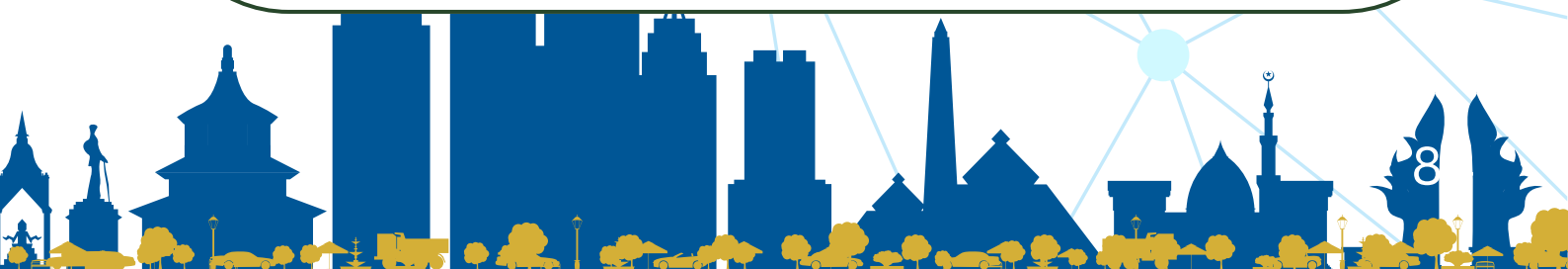
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
138	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-Building (Sistem Informasi Bangunan Pemerintah untuk Penataan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Bangunan Pemerintah)	Implementasi	Program penataan Bangunan Gedung	
139	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-Housing (satu akses DPRKPP, aplikasi mobile/android untuk mempermudah layanan DPRKPP cukup melalui satu akses)	Implementasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
140	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-Mbangun	Implementasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
141	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Rusun (Sistem Informasi yang mempermudah Pengelolaan Rumah Susun Sewa di Kota Surabaya sebagai Media Informasi bagi Masyarakat dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun)	Implementasi	Program Pengembangan Perumahan	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
142	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi pelayanan publik	Digital	SIDATAN (Sistem Informasi Pengadaan Tanah)	Implementasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
143	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIPSU (Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Implementasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
144	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SITARUBOYO (Sistem Informasi Tata Ruang Suroboyo)	Implementasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
145	Dinas Sosial	inovasi pelayanan publik	Digital	Sikeluargamiskin (Sistem Informasi Keluarga Miskin)	Implementasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
146	Dinas Sosial	inovasi pelayanan publik	Digital	SKM Online	Implementasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
147	Dinas Sosial	inovasi pelayanan publik	Digital	RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo)	Implementasi	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Kampung Anak Negeri	
148	Dinas Sosial	inovasi pelayanan publik	Digital	RAP (Rumah Anak Prestasi)	Implementasi	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Kampung Anak Negeri	
149	Dinas Sosial	inovasi pelayanan publik	Digital	FLASH (Fasilitasi Layanan Ambulance dinSos Hadir)	Implementasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
						Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
150	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Paving Geprek (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan)	Implementasi	Pemeliharaan Rutin Jalan	
151	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi pelayanan publik	Digital	SIKOMTEK (Sistem Informasi Rekomendasi Teknis)	Implementasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
152	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Padat Karya PUMIMA (Produksi U-Ditch Masyarakat Mandiri)	Implementasi	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
153	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sigap Jalan (Sistem Informasi Tanggap Pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Implementasi	Pemeliharaan Rutin Jalan	
154	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Si DILAN (Sistem Informasi Kondisi Jalan)	Implementasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
155	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Implementasi Pelaksana Konsep Maintenance Armada Alat Angkut (LANCAR)	Implementasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
156	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Manajemen Laporan Integritas Satu Data (MANJALITA)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
157	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Aplikasi Keuangan dan Personal V2 (AKAPELA V2)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
158	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Surabaya Holiday Super Sale (SHSS)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
159	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kolaborasi Bundling Tiket Wisata Perahu Kalimas dengan Hotel	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
160	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Surabaya Startup Festival	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
161	RSUD Bhakti Dharma Husada	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	PETIS RAJA (Pelayanan Otomatis Rawat Jalan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
162	RSUD Bhakti Dharma Husada	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	PETIK MADU (Pengelolaan Limbah Domestik Serta Manajemen)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



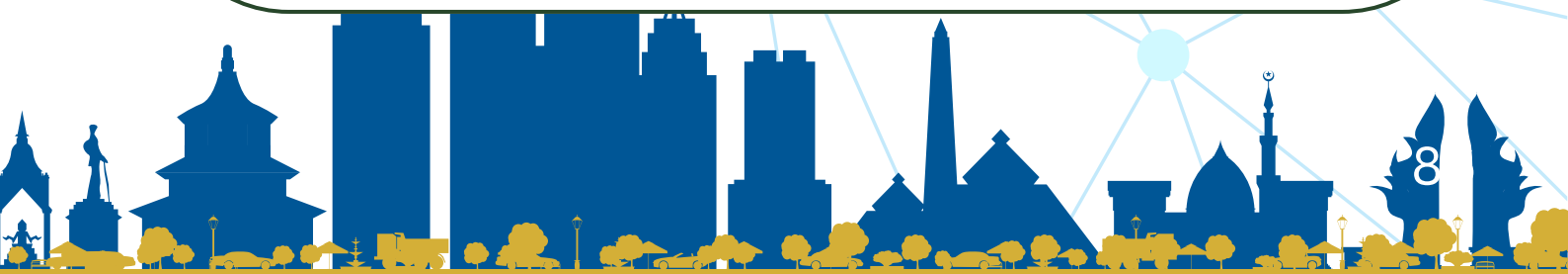
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
163	RSUD Bhakti Dharma Husada	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	E-SPO	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
164	RSUD Bhakti Dharma Husada	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	AI (Asisten Informasi) BDH	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
165	RSUD Bhakti Dharma Husada	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SQUAD BDH	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
166	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIMPLE (Sistem Inventaris Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan)	Implementasi	Peningkatan Layanan BLUD	
167	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	DUMPLING (Edukasi Pendampingan Ibu Oleh Bidan dan Keluarga)	Implementasi	Peningkatan Layanan BLUD	
168	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Fast Track Chest Pain	Implementasi	Peningkatan Layanan BLUD	
169	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	inovasi pelayanan publik	non digital	AKSI REK (Antisipasi dan Koreksi Pendarahan Dengan Depres Medipack)	Implementasi	Peningkatan Layanan BLUD	
170	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	inovasi pelayanan publik	non digital	Semat Gujet Tu Fluset (Sehat dan Hemat Menggunakan Air Reject Untuk Flusing Closed)	Implementasi	Peningkatan Layanan BLUD	
171	RSUD Eka Candrarini	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SINTESA (SISTEM INFORMASI TERPADU UNTUK EVALUASI STRATEGI DAN AKSI)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
172	RSUD Eka Candrarini	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIGAP (SISTEM INFORMASI PENGALUAN PERENCANAAN)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
173	RSUD Eka Candrarini	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	EGula (Elektronik Regulasi)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
174	RSUD Eka Candrarini	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SSO RSEC (Sistem Single Sign-On RSUD Eka Candrarini)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
175	RSUD Eka Candrarini	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	LABURA-Q (Labelisasi Barang Transparansi Aset - QR Reporting System)	Implementasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
176	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi pelayanan publik	non digital	Asuhan Rembulan	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
177	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Pol PP Pariwisata	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
178	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	Satpol PP Goes To School	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah				dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
179	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Satpol PP Pemantau Perairan	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
180	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Satpol PP Pemantau Traffic Light	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
181	Satuan Polisi Pamong Praja	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Satpol PP Sepatu Roda Regeneration	Implementasi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
182	Bagian Hukum dan Kerjasama	inovasi pelayanan publik	Digital	E-Kerjasama	Implementasi	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
183	Bagian Hukum dan Kerjasama	inovasi pelayanan publik	Digital	SIM Mitra	Implementasi	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
184	Bagian Hukum dan Kerjasama	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	JDIH Kota Surabaya	Implementasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
185	Bagian Hukum dan Kerjasama	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	E Sidang	Implementasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	
186	Bagian Hukum dan Kerjasama	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Si Kumis	Implementasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	
187	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASPAL (Aplikasi Standar Pelayanan)	Implementasi	Penataan Organisasi	
188	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-ABK (Analisis Beban Kerja)	Implementasi	Penataan Organisasi	
189	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Anjab (Analisa Jabatan)	Implementasi	Penataan Organisasi	
190	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SOP PEDAS (Sistem Operasional Prosedur Perangkat Daerah Kota Surabaya)	Implementasi	Penataan Organisasi	
191	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIMONIK (Sistem Monitoring Akuntabilitas Kinerja)	Implementasi	Penataan Organisasi	
192	Bagian Organisasi	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Si ToMaS PeDe (Sistem monitoring reformasi birokrasi Perangkat Daerah)	Implementasi	Penataan Organisasi	
193	Bagian Organisasi	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SUSAN MAS-e (Survei kepuasan Masyarakat Elektronik)	Implementasi	Penataan Organisasi	



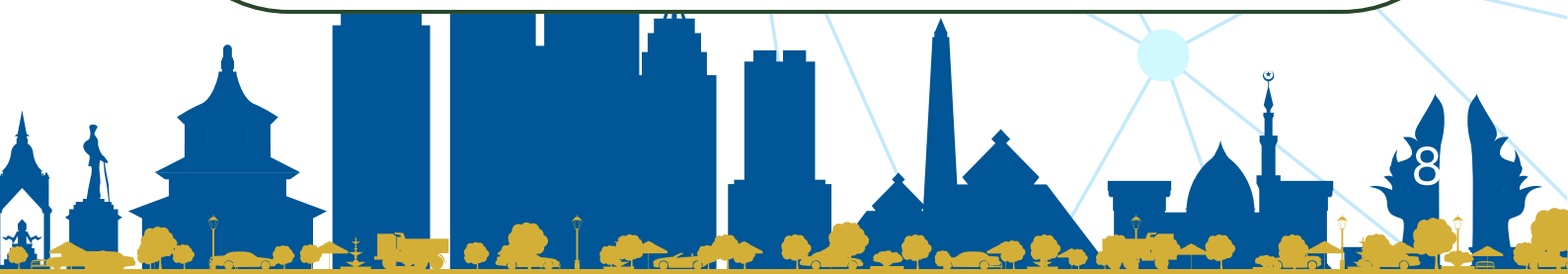
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
194	Bagian Organisasi	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	TELAGA ASA (sisTem EvaluaSi kelembaGAAn kotA Surabaya)	Implementasi	Penataan Organisasi	
195	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Basis Data Kewilayahan	Implementasi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
196	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Aplikasi SPJ Pemuda Tangguh (Aplikasi Pelaporan Siswa Warga Surabaya SMA/ SMK/MA Penerima Beasiswa)	Implementasi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
197	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Sistem Informasi Pertanahan	Implementasi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
198	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e-Delivery	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
199	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	e-Performance	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
200	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	inovasi pelayanan publik	non digital	Klinik Pengadaan Barang/Jasa	Implementasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
201	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Lavender (Penilaian Evaluasi Kinerja Rumah Padat Karya)	Implementasi	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
202	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital dan non digital	Kios TPID (Kios Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	Implementasi	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
203	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Sinkronisasi kinerja BUMD Secara realtime melalui Dashboard Kinerja	Implementasi	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
204	Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e- Mamin (Makan Minum)	Implementasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
205	Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	PENTAS (Pencatatan Prestasi)	Implementasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
206	Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Buku Tamu Online	Implementasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
207	Kecamatan Asemrowo	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Wisata Religi Kiswah Kabah Asemrowo	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
208	Kecamatan Asemrowo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Dodolan Asemrowo Asik (DOA)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
209	Kecamatan Asemrowo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	Digital	Aplikasi Sistem Informasi Andalan, Santun, Inovatif dan Kreatif (SI ASIK)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
210	Kecamatan Asemrowo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Pelangi Sontoh Laut (KAPSOL)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
211	Kecamatan Benowo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	PELANTAWA (Pelayanan Tanggap Warga)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
212	Kecamatan Benowo	inovasi pelayanan publik	non digital	Kampung Sepatu, Workshop dan Galeri RW 3 Kel. Tambak Osowilangun	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
213	Kecamatan Benowo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Semanggi	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
214	Kecamatan Bubutan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Bubutan Smart Center (BSC)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
215	Kecamatan Bubutan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Rumah Bank Sampah dan Budidaya Cacing Puspa Mandiri	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

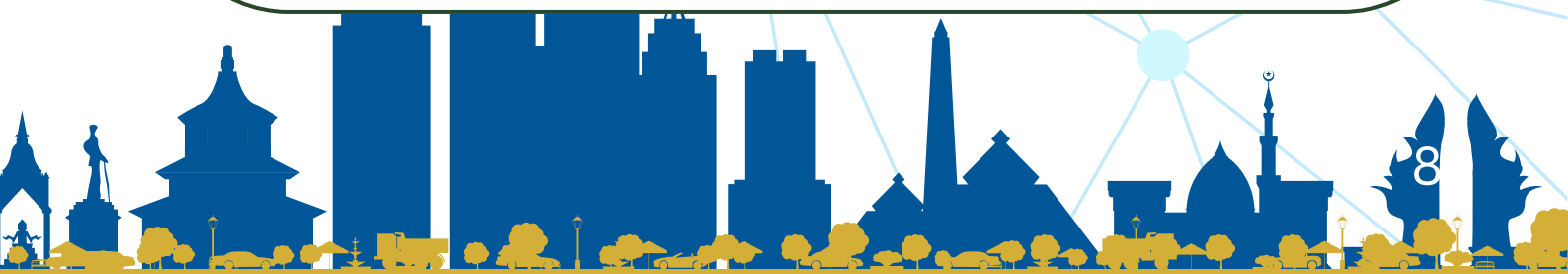
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
216	Kecamatan Bubutan	inovasi pelayanan publik	non digital	Pengelolaan sampah organik Galonkura (PESONA)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
217	Kecamatan Bulak	inovasi pelayanan publik	Digital	SI BADAK (Sistem Informasi Bulak Dalam Angka dan Kegiatan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
218	Kecamatan Bulak	inovasi pelayanan publik	non digital	ISOK PAS TB (Arisan Kelompok Peduli Anak Stunting dan Tuberkulosis)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
219	Kecamatan Bulak	inovasi pelayanan publik	non digital	Posyandu Nelayan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
220	Kecamatan Dukuh Pakis	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SMS (Sillaturahmi Membangun Sinergitas)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
221	Kecamatan Dukuh Pakis	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Dassi Next Generation (Dukuh Pakis Sehat Cerdas dan Kreatif)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
222	Kecamatan Dukuh Pakis	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	BePeKa (Barcode Pelayanan Kecamatan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
223	Kecamatan Gayungan	inovasi pelayanan publik	non digital	GEGANA (Gerakan Gayungan Anti Narkoba)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
224	Kecamatan Gayungan	inovasi pelayanan publik	non digital	GERCEP (Gayungan Bersama Cegah Pernikahan Dini)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
225	Kecamatan Gayungan	inovasi pelayanan publik	non digital	Posyandu Smart Dukuh Menanggal	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
226	Kecamatan Gayungan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Lele dan Jamur Kelurahan Gayungan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
227	Kecamatan Gayungan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Menanggal Mesra (Melayani Efektif & Efisien, Solutif, Responsive, Akuntabel)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
228	Kecamatan Gayungan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Sinau & Ngaji Bareng Ketintang	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
229	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	BESTI (Balai Edukasi dengan Smart venTilasi)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
230	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Jebol IMB	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
231	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	Digital	Jebol Anduk Akte Kelahiran + Akte Kematian	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

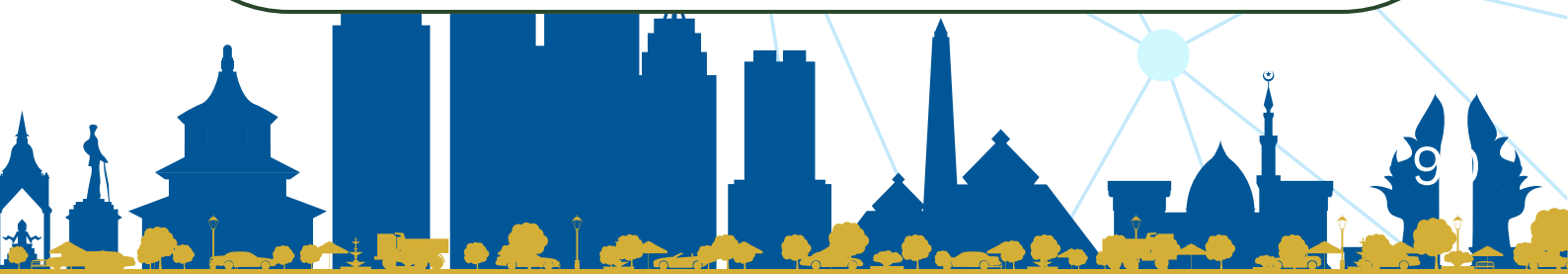
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
232	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Jebol Anduk IKD / KTP Digital	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
233	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	PAS PENTING PLUS = kaPASari Sehat PEDuli StuNTING - Pemberdayaan stakeholder Untuk Semua	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
234	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	OPTIMALISASI PEMANFAATAN PROGRAM PADAT KARYA (Perkasa Printing, Cucimotor AREK KAPASARI)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
235	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	POTENSI UNGGULAN KAMPUNG LUMPIA NGAGLIK KUBURAN	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
236	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Transformasi Budaya Lokal: Ludruk Arek Kapasari sebagai Wadah Inovasi dan Sosialisasi Diri Bagi Generasi Muda	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
237	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	Digital	Pemberdayaan PIK-R Elixir Kapasari dalam Upaya Pendampingan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah		dan Peer Educator (Pendidik Sebaya) untuk Mewujudkan Remaja Kapasari			
238	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Pemanfaatan Big Data Rumah Dataku sebagai BasisData untuk Intervensi Program yang Tepat Sasaran.	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
239	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	FORSI KSH Kapasari (Forum Sinergi Kader Surabaya Hebat)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
240	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	POTENSI LOKAL PRODUK UNGGULAN (Batik Galuh Surabayan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
241	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Unit Layanan Disabilitas di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
242	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Kampung Heritage	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
243	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	Digital	Jemput Bola Pelayanan Adminduk	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah					
244	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sosialisasi KNG Mandiri	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
245	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	GETAR (Gerakan Arek Karang Taruna)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
246	Kecamatan Genteng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Peduli Tumbuh Kembang Anak untuk Generasi Emas (Pelita Emas)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
247	Kecamatan Gubeng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	AREK EMAS (Ayo Renang Rek Entaskan Masalah Stunting)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
248	Kecamatan Gubeng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SINAR MAS GUBENG	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
249	Kecamatan Gubeng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KAMPUNG 'GASING', GADget SINGkirno..!	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



INOVASI DAERAH

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
250	Kecamatan Gubeng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	PALEM TANDUK (PELAYANAN KELURAHAN MOJO TERTIB ADMINDUK)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
251	Kecamatan Gubeng	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KELOMPOK USAHA TANI "PUCANG SEWU ASRI"	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
252	Kecamatan Gunung Anyar	inovasi pelayanan publik	non digital	K.G.A Edu Farm	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
253	Kecamatan Gunung Anyar	inovasi pelayanan publik	non digital	Rumah Berwirausaha (Kedai Gunung Anyar)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
254	Kecamatan Gunung Anyar	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Pengelolaan Sampah Komprehensif	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
255	Kecamatan Jambangan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Jago Karah Farm (JKF)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
256	Kecamatan Jambangan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Posyandu ASIK	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
257	Kecamatan Jambangan	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	GETOL (GESang nisor TOL)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
258	Kecamatan Jambangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SATU PADU (puSAT Usaha Pertanian terPADU)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
259	Kecamatan Karang Pilang	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Taman Inovasi, Edukasi Banana Park	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
260	Kecamatan Karang Pilang	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Panggon Mangan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
261	Kecamatan Karang Pilang	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	BSI (Bank Sampah Induk)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
262	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Surga Kenjeran (Siaga Untuk waRGA Kenjeran)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
263	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Taksi Penting (Takal Bersinergi untuk Pengentasan dan Pencegahan Balita Stunting)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
264	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Ketan Beraas (Kegiatan Berenang Bersama Balita Stunting)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
265	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Digimons (Digitalisasi Penomoran Surat)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



INOVASI DAERAH

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
266	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Kampung UMKM Sejahtera	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
267	Kecamatan Kenjeran	inovasi pelayanan publik	non digital	Sinimas Merapat (Siap Melayani Masyarakat Setempat)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
268	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Sayur KWT Dorang Cinta RT 10 RW 3	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
269	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Ternak RT 9 RW 3	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
270	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Parikan (RW.04)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
271	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Wisata Edukasi Pengelolaan Lingkungan (RW.05)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
272	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Bahari (RW.04)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
273	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Nelayan/Pengasapan Ikan (RW.08)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
274	Kecamatan Krembangan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Rempah (RW 11)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
275	Kecamatan Lakarsantri	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	KLINIK UMKM	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
276	Kecamatan Lakarsantri	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Pasar Ndeso Nyi Pandan sari	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
277	Kecamatan Lakarsantri	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Wisata Rakyat Balong Sumurwelut	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
278	Kecamatan Mulyorejo	inovasi pelayanan publik	Digital	RUMAH KAMU (Ruang Ramah Anak Kecamatan Mulyorejo)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
279	Kecamatan Mulyorejo	inovasi pelayanan publik	non digital	PARKUSDIWA (Parkir Khusus Disabilitas dan Wanita)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
280	Kecamatan Mulyorejo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SMEP (Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kecamatan Mulyorejo	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

INOVASI DAERAH

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
281	Kecamatan Pabean Cantian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Creative Hub	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
282	Kecamatan Pabean Cantian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital dan non digital	TP MART	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
283	Kecamatan Pabean Cantian	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital dan non digital	Social Center	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
284	Kecamatan Pakal	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	BEBRAYAN (Berbagi Bersama dengan karyawan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
285	Kecamatan Pakal	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	PELAN DOIKU (Pelayanan Antar Dokumen Adminduk)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
286	Kecamatan Pakal	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	SIWALAN NIKMAT (Siap Melayani Ditempat)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
287	Kecamatan Pakal	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	CAKSODIKIN (Sedekah Pada Fakir Miskin)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
288	Kecamatan Rungkut	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Dapur Berkah (Kel. Penjaringansari-RW 08)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

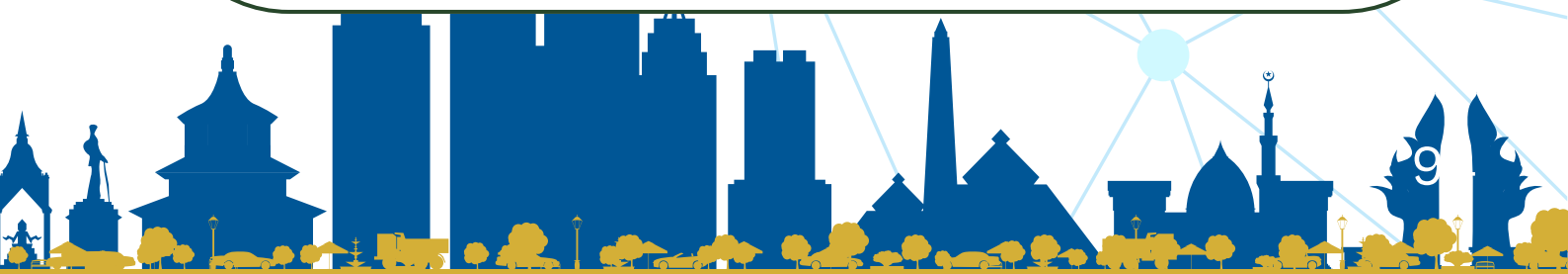
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
289	Kecamatan Rungkut	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Gerai UMKM (Kel. Wonorejo)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
290	Kecamatan Rungkut	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Mandiri (Kel. Kedung Baruk-RW 05)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
291	Kecamatan Rungkut	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Ketahanan Pangan dengan Budidaya Ikan Lele (Kel. Rungkut Kidul)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
292	Kecamatan Rungkut	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Pengembangan Kampung Kue (Kel. Kalirungkut - RW 5)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
293	Kecamatan Rungkut	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Wisata Edukasi Kosagra Lestari (Kel. Medokan Ayu)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
294	Kecamatan Sambikerep	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	BESTARI BUMI (samBikrEp IESTARI sedekah BUMI) Kecamatan Sambikerep	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
295	Kecamatan Sambikerep	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	SAMBIARUM BERWARNA (kampung wisata dan peduli kepada lingkungan, pendidikan,	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah		budaya tradisional, kesejahteraan warga) Kelurahan Sambikerep			
296	Kecamatan Sambikerep	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KEPITING BERINGIN (KEgiatan Pendampingan keluarga dan balita stunTING kelurahan BERINGIN)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
297	Kecamatan Sawahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Dapur Umum	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
298	Kecamatan Sawahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Relawan Tanpo Sambat	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
299	Kecamatan Sawahan	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	e--Portal Agenda Surat Ahli Waris	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
300	Kecamatan Semampir	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Jajanan Kuliner Khas Ampel	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
301	Kecamatan Semampir	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang	non digital	KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

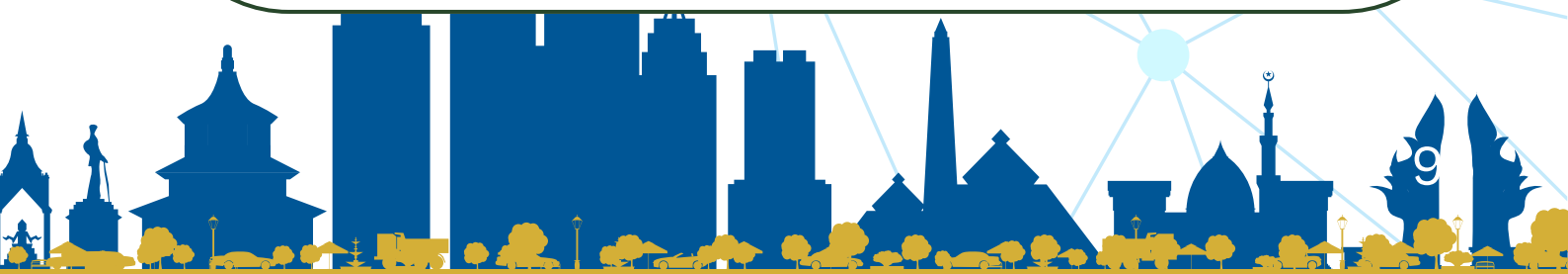
No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
		menjadi kewenangan daerah		Kelurahan Sidotopo RW 02			
302	Kecamatan Semampir	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KAS-RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak) Kelurahan Wonokusumo RW 06	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
303	Kecamatan Simokerto	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Bawang Kelurahan Simolawang	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
304	Kecamatan Simokerto	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Pecinan Kelurahan Kapasan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
305	Kecamatan Simokerto	inovasi pelayanan publik	non digital	Kampung Arek Suroboyo Kelurahan Sidodadi	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
306	Kecamatan Simokerto	inovasi pelayanan publik	non digital	Sentra Kuliner UKM Laza Kelurahan Simokerto	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
307	Kecamatan Simokerto	inovasi pelayanan publik	non digital	Urban Farming, Kampung Arek Suroboyo, Bank Sampah Kelurahan Tambakrejo	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
308	Kecamatan Sukolilo	inovasi pelayanan publik	Digital	PANCALILO (Pelayanan Kecamatan Sukolilo)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	





No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
309	Kecamatan Sukolilo	inovasi pelayanan publik	non digital	PANGLINGLILO (Pemberdayaan Pengamanan Lingkungan Sukolilo)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
310	Kecamatan Sukolilo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	PODOLILO (Pemberdayaan Pemuda Sukolilo)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
311	Kecamatan Sukomanunggal	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Sampah Go	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
312	Kecamatan Sukomanunggal	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	On - Time Report Tabungan Nasabah	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
313	Kecamatan Sukomanunggal	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	SIHANTER (Informasi Kelurahan Terpadu)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
314	Kecamatan Tambaksari	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KOPI BESTARI (Kolaborasi Program dan Integrasi Bersama Stakeholder Tangani Stunting)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
315	Kecamatan Tambaksari	inovasi pelayanan publik	non digital	SIMPUL (Sinergi Membangun Potensi UMKM Lokal)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
316	Kecamatan Tambaksari	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	SI PUSPA (Sinergi Puspaga, PKBM, PPA)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
317	Kecamatan Tandes	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Pos Penanganan Stunting Bagi Balita	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
318	Kecamatan Tandes	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Posga "Wethan Ceria"	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
319	Kecamatan Tandes	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	non digital	Rumah Sabun Tandes Sejahtera	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
320	Kecamatan Tandes	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Wisata Tematik "Wethan Wonderland"	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
321	Kecamatan Tegalsari	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Non Digital	Gerak Temu Cepat dan Reaksi Cepat dalam Pantau Wilayah segala permasalahan baik sosial dan fisik sarana prasarana lingkungan	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
322	Kecamatan Tegalsari	inovasi pelayanan publik	Non Digital	Konsultan Pelayanan Publik	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
323	Kecamatan Tegalsari	inovasi pelayanan publik	Non Digital	Pelayanan Dapur Umum	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



INOVASI DAERAH

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
324	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	inovasi pelayanan publik	non digital	KUPAT MAMAH (Kunjungan di Tempat Masalah Lemah)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
325	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	inovasi pelayanan publik	non digital	KUPAT MASAL (Kunjungan di Tempat Masalah Sosial)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
326	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	inovasi pelayanan publik	non digital	KUPAT PANDUK (Kunjungan di Tempat Pelayanan Kependudukan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
327	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	KUPAT LARIS (Kunjungan di Tempat Pelayanan Waris)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
328	Kecamatan Wiyung	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Therapeutic Stunting Center	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
329	Kecamatan Wiyung	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Jajartunggal Zero Stunting	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
330	Kecamatan Wiyung	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Kampung Wisata Lingkungan Babatan Pilang Sebagai Sarana Edukasi Anak Paud	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
331	Kecamatan Wiyung	inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	non digital	Pengolahan Limbah Organik (Sampah Rumah Tangga) Dari Sumber Yang Terintegrasi Dengan Pekaranagan Pangan Lestari	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
332	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	non digital	Pesantren Kilat/ Smart Nyantri	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
333	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	non digital	Taman Urban Farming	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
334	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	non digital	Wisata Religi	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
335	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	Digital	Care (Kepedulian Aparatur Kecamatan kepada Masyarakat)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
336	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	Digital	Love Wonocolo	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
337	Kecamatan Wonocolo	inovasi pelayanan publik	Digital	Perikanan Sistem Biorasponik Kerjasama dengan UK. Petra dan PT. Kencana Kepuh Permai	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
338	Kecamatan Wonokromo	inovasi pelayanan publik	non digital	Donasi Kampung Pancasila	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
339	Kecamatan Wonokromo	inovasi pelayanan publik	non digital	Kampung Jamu	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
340	Kecamatan Wonokromo	inovasi pelayanan publik	non digital	Kampung Lele	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah		340	340	340	340	340	

Detail Jumlah Per kriteria

Bentuk Inovasi	Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	171
	Inovasi pelayanan publik	83
	inovasi tata kelola pemerintahan daerah	86
Jenis Produk Inovasi	Digital	155
	Non Digital	182
	Digital dan Non Digital	3
Status Produk Inovasi	Implementasi	340

Surabaya, 27 Febuari 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Surabaya



Dr. AGUS IMAM SONHAJI ST, M.MT
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 197010231996021001

PENUTUP



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



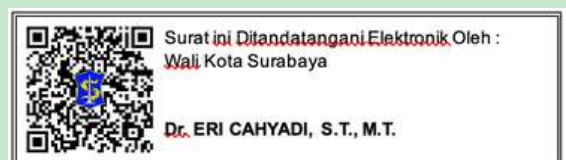
“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang, berikut alokasi dana dan realisasinya selama tahun 2025 telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya indikator pembangunan yang menunjukkan hasil yang baik, namun di sisi lain juga dapat dilihat adanya beberapa indikator pembangunan yang belum mencapai target dan membutuhkan perhatian kita bersama guna menjadikan Kota Surabaya lebih baik lagi kedepannya.

Hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (stakeholder) baik itu pemerintah, swasta serta masyarakat Kota Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud dengan baik. Tantangan terbesar Kota Surabaya adalah menyiapkan Kota Surabaya agar tidak termarginalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Surabaya yaitu :

Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2025 ini sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri melalui Ibu Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat. Atas segala perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Gubernur terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Surabaya disampaikan ucapan terima kasih.

Surabaya, 31 Maret 2026







**PEMERINTAH
KOTA SURABAYA**

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

2025

**BAGIAN PEMERINTAHAN &
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SURABAYA
(031) 531-2144**



Gedung Pemerintahan Kota Surabaya Lt. IV
Jl. Jimerto 25 - 27 Kel. Genteng
Kec. Ketabang - Kota Surabaya



<https://pemerintahan.surabaya.go.id>